

BAB III

KERUNTUHAN TURKI UTSMANI DAN RESPON UMAT ISLAM

HINDIA BELANDA

A. Artikulasi Pan-Islam di Hindia Belanda

Aspek penting yang dipegang dalam paham Pan-Islam selain haji adalah jabatan khalifah. Dalam konteks ini, posisi kekhalifahan yang saat itu ada di Turki Utsmani menjadi penting bagi umat Islam. Secara umum, Pan-Islam diterjemahkan sebagai gerakan pembebasan dunia Islam dari penjajahan dan kembali ke dalam kejayaan seperti abad-abad pertengahan, salah satu upayanya adalah dengan revitalisasi lembaga khilafah yang mulai melemah. Namun dalam perkembangannya, artikulasi dari Pan-Islam sendiri berbeda satu sama lain.¹ Di Hindia Belanda sendiri, gagasan Pan-Islam lebih dimaknai sebagai upaya pembaharuan Islam. Pan-Islam di Hindia Belanda diterima secara luas oleh umat Islam Hindia Belanda melalui beragam salurannya. Hampir tidak ada penolakan atas wacana Pan-Islam.

Pan-Islam di Hindia Belanda sendiri diartikulasikan di tingkat individu dan juga kelompok. Di tingkat individu, Pan-Islam yang berkembang di Hindia Belanda dianggap sebagai upaya perlawanan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah kolonial. Dalam konteks ini, artikulasi dari kegiatan yang dilakukan

¹ Titik penting dari Pan-Islam adalah kesatuan umat Islam dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme Barat. Artikulasi Pan-Islam ini yang awalnya dikenalkan oleh Jamaluddin Al-Afgani dan berikutnya berkembang lebih jauh dengan konsep yang berbeda namun semangat yang sama yang disampaikan pula oleh Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh. Lebih jauh dapat lihat, J. Suyuthi Pulungan, *Ide Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha Tentang Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, dalam *Jurnal Tamaddun*, (Fakultas Adab dan Budaya Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2013), h. 1-22.

oleh masing-masing individu ini akan sangat tergantung pada kemampuan individu itu sendiri. Di antara kegiatan yang dilakukan di tingkat individu adalah dengan memberikan dukungan berupa dukungan material untuk kepentingan propaganda Pan-Islam di Hindia Belanda.

Di tingkat kelompok Pan-Islam lebih dimaknai sebagai upaya pembaharuan Islam. Maka, dalam konteks ini Pan-Islam membuahkan berdirinya beragam organisasi Islam baik besar maupun kecil. Hiruk pikuk pembaharuan Islam yang berkembang di Timur Tengah di rentang abad 19-20 M seiring dengan waktu menjalar pula hingga ke Hindia Belanda yang pada waktu itu juga sedang timbul semangat pergerakan nasional. Pengaruh pembaharuan itu diterima baik secara langsung (lewat haji dan pertukaran pelajar) maupun secara tidak langsung (melalui media massa). Para tokoh-tokoh pergerakan Islam mulai menyadari pembentukan organisasi sebagai bentuk perjuangan (baru) dalam menentang imperialisme Belanda.

Karena Pan-Islam merespon dengan pendirian organisasi-organisasi Islam, maka pertumbuhan dan perkembangan organisasi-organisasi Islam itu di dorong oleh ajaran Islam yang didasari dengan kesadaran umat Islam itu sendiri untuk membersihkan campur aduknya kehidupan agama dengan unsur-unsur lain, memperbaiki kualitas pendidikan, sosial ekonomi sebagai akibat dari penjajahan juga menghadapi aktifitas *zending*. Artikulasi dari kegiatan yang dilakukan organisasi Islam itu antara lain, membersihkan Islam dari pengaruh kebiasaan non-Islam, reformasi doktrin Islam dengan pandangan alam modern, reformasi pendidikan dan ajaran Islam, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan dari luar,

melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, atau dapat disimpulkan untuk memperbaharui dan menyempurnakan ibadah dan aqidah serta untuk mencapai kemerdekaan.²

Bagi pemerintah Hindia Belanda, gerakan Pan-Islam yang berkembang di Timur Tengah, sebenarnya telah menjadi kajian analisis Snouck Horgronje, sehingga ada kekhawatiran gerakan ini akan masuk ke Hindia Belanda dan hal tersebut disampaikan kepada pemerintah Hindia Belanda agar membendung pengaruh Pan-Islam. Namun, derasnya arus informasi yang berkembang di awal abad ke-20 M terutama informasi-informasi yang berkaitan dengan Pan-Islam, pada dasarnya sudah tidak mampu dibendung oleh pemerintah Hindia Belanda.

Meskipun demikian, perlu ditekankan kembali bahwa umat Islam Hindia Belanda lebih melihat Pan-Islam sebagai gagasan politis, perlawanan terhadap Barat yang diprakarsai oleh Sultan Abdul Hamid II dari Turki Utsmani. Di samping itu, Pan-Islam menjadi indetik dengan keberadaan orang-orang Arab di Hindia Belanda. Posisi orang-orang Arab yang ada di Hindia Belanda menjadi posisi yang penting bagi ketersebarluasannya gagasan Pan-Islam di Hindia Belanda. di tingkat individu, banyak dari orang Arab di Hindia Belanda yang memiliki kekayaan dan dengan kekayaannya mereka mendukung pihak-pihak yang mempropagandakan Pan-Islam. Di tingkat kelompok, mereka membentuk perkumpulan Jami'at Khair. Jami'at Khair sendiri didirikan pada tahun 1901 tanpa mendapatkan ijin pendirian dari pemerintah kolonial Belanda. Namun, para pemimpin dari perkumpulan ini mempunyai hubungan dengan negara-negara

² Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Timur Tengah*, (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 14.

seperti Mesir dan (terutama) Turki sehingga mereka masih tetap dapat berdiri walau dengan syarat tertentu.³

Dalam perkembangan selanjutnya, Pan-Islam tidak sekedar menginspirasi terbentuknya persatuan bumiputera dan umat Islam Hindia Belanda, melainkan menjadi penguat basis ideologis Islam dalam membentuk persatuan Islam secara Nasional. Pada tahap ini, semangat gerakan Pan-Islam semakin tampak menjadi bagian penting dalam perjuangan nasional, terutama perjuangan yang dilakukan oleh Sarekat Islam. Hubungan semangat Pan-Islam dan pembentukan Sarekat Islam memang telah terlihat sejak pendirian SI. Hal ini terbukti dengan para tokoh SI yang melakukan kontak dengan Turki dan Sarekat Islam menjadi organisasi utama yang menjadikan Pan-Islam -dalam kaitannya dengan Turki Utsmani- sebagai wacana politis.⁴ Maka, dalam konteks ini Sarekat Islam dapat dikatakan menjadi *role leader* dalam kaitannya dengan propaganda Pan-Islam di Hindia Belanda dan segala hal yang berhubungan dengan Turki Utsmani.

³ Jami'atul Khair dibentuk dengan tujuan utama mendirikan satu model sekolah modern yang terbuka luas untuk umat Islam. Perkumpulan ini lebih menitikberatkan pada semangat pembaruan melalui lembaga pendidikan modern dengan membangun sekolah bukan semata-mata bersifat agama, tapi sekolah dasar biasa dengan kurikulum agama, berhitung, sejarah, ilmu bumi dan bahasa pengantar Melayu. Jami'atul Khair disebut telah menginspirasi lahirnya Budi Utomo. M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 367-369. Keberadaan Jam'iat Khair kemudian disusul dengan kemunculan organisasi Al-Irsyad. Kedua organisasi Islam ini setidaknya-tidakny dapat disebut sebagai penggerak dunia Islam yang pertama kali muncul di Indonesia/Hindia Belanda sebagai hasil artikulasi Pan-Islam. Posisi pentingnya Jam'iat Khair adalah merekalah yang memulai organisasi dalam bentuk modern dalam masyarakat Islam (dengan anggaran dasar, daftar anggota tercatat, rapat-rapat berkala), dan yang mendirikan sekolah dengan cara-cara yang banyak sedikitnya telah modern (kurikulum, kelas-kelas, dan pemakaian bangku-bangku, papan tulis dan sebagainya).

⁴ Pengaruh Pan-Islam terlihat pasca Tjokroaminoto membentuk CSI. Tjokroaminoto beserta para aktivis SI lainnya kembali menyuarakan (persatuan) Islam sebagai basis pergerakan SI. Gagasan Islam yang disuarakan oleh Tjokroaminoto seperti halnya pedang bermata dua. Satu sisi, Islam dijadikan sebagai isu untuk mengikat kembali para pemodal asal Arab dan keturunannya yang sejak 1914 keluar sebagai donatur tetap SI. Di sisi lain, Tjokroaminoto menggunakan Islam sebagai media pengikat bumiputera untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Belanda. Lihat, A.P.E. Korver, *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), h. 68.

B. Kabar Keruntuhan Turki Utsmani di Hindia Belanda

Di awal abad ke-20 M, arus informasi dapat dikatakan telah berkembang dengan pesat. Perkembangan arus informasi di Hindia Belanda telah didukung dengan adanya infrastruktur penunjang⁵ dan kemampuan masyarakat dalam mengaksesnya. Beragam informasi mengenai dunia di luar kawasan Hindia Belanda dapat diakses oleh masyarakat secara luas terutama melalui media cetak. Walau tidak menutupi adanya saluran lain atas arus informasi dari luar yang masuk ke Hindia Belanda, namun media massalah -dalam hal ini media cetak berupa surat kabar maupun majalah- yang berperan besar dalam penyebaran informasi secara massif, sehingga pemberitaan mengenai Turki Utsmani juga diikuti oleh umat Islam Hindia Belanda melalui perantara media massa dan begitupun sebaliknya.⁶

⁵ Arus informasi disini dapat berlangsung dengan menggunakan bantuan teknologi pengiriman informasi. Di akhir abad ke-19 M, kawasan Hindia Belanda telah menggunakan teknologi komunikasi dengan medium elektromagnetik, dengan alat berupa telegraf. Di awal abad ke-20 M, jaringan telegraf ini telah terhubung di seluruh pulau-pulau besar di kawasan Hindia Belanda. Jaringan telegraf ini juga telah terpasang antar negara dimana pulau Jawa telah terhubung dengan negeri Belanda, Australia, dan juga Singapura. Dengan bantuan telegraf ini arus informasi dapat berlangsung dengan lebih cepat jika dibandingkan dengan pola komunikasi tradisional dengan menggunakan angkutan transportasi, walau juga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Ulasan lengkap dapat lihat, M. Sahari Besari, *Teknologi di Nusantara: 40 Abad Hambatan Inovasi*, (Jakarta: Salemba Teknika, 2008), h. 119-145.

⁶ Secara umum, arus informasi dari luar kawasan Hindia Belanda yang masuk ke Hindia Belanda dapat melalui berita perseorangan, baik melalui para haji atau dari para pelajar yang kembali ke Hindia Belanda dan melalui media massa. Namun, peran media massa menjadi lebih penting kedudukannya dalam konteks penyebaran informasi secara massif. Media massa/pers telah membuat revolusi atas arus informasi dan komunikasi, antara lain mengubah pola komunikasi tradisional yang terutama lisan sifatnya menjadi tertulis. Pers juga menciptakan sistem komunikasi terbuka, dimana informasi dapat diperoleh oleh golongan sosial manapun. Meskipun komunikasi lewat pers bersifat satu arah, pers mempunyai potensi membangkitkan kesadaran kolektif, antara lain mengenai kepentingan umum, seperti keamanan, kesejahteraan, sosial budaya, kemasyarakatan, ketatanegaraan dan lain sebagainya. Oleh karena itu dunia media massa/pers mendapat perhatian yang besar dari golongan pergerakan di Hindia Belanda. Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: dari Kolonialisme sampai Nasionalisme jilid 2*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 116. Dalam konteks informasi mengenai Nusantara, terutama Aceh sebagai wilayah yang secara resmi menjalin hubungan politik dengan Turki Utsmani, pihak Turki telah lama mendapatkan informasi, dalam hal ini melalui lisan para utusan Turki. Setelahnya informasi mengenai Aceh disebarluaskan melalui media massa cetak ke beberapa kawasan lain, termasuk tersebar di Jawa (komunitas Jawi). Penyebaran informasi ini dilakukan melalui media massa cetak dan terjadi pada abad ke-19 M. Lihat, A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta: Penerbit Beuna, 1983), h. 102-103. Berangkat dari hal ini, arus informasi mengenai

Kebutuhan informasi yang cepat yang dibutuhkan oleh kaum terpelajar serta meluasnya cakrawala perhatian terhadap dunia luar, menjadikan media massa (cetak) di masa itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kemunculan dan perkembangan media massa juga menjadi semacam “jalan baru” bagi perjuangan pergerakan nasional. Hal ini dapat dilihat dari pola perjuangan yang mulai menggunakan tradisi tulisan yang dituangkan dalam media pers. Sesuatu yang baru muncul di awal abad ke-20 M. Keberadaan media massa sebagai akses informasi menjadi penting untuk menumbuhkan kesadaran nasional. Media massa tidak hanya memberi penerangan kepada para pembacanya tentang berbagai kejadian yang terjadi di sekitar mereka, tetapi juga menunjukkan arti beberapa fakta, mendidik pembaca, serta menunjukkan kebobrokan dan berbagai kekurangan yang ada dalam pranata masyarakat. Media massa juga dapat dikatakan sebagai saluran pemersatu bangsa kala itu.

Terkait dengan Turki Utsmani, penyebaran arus informasi ini berlangsung dua arah dengan didukung dengan pengaruh dan citra dari masing-masing pihak. Tidak hanya satu sisi dimana Turki Utsmani saja yang mampu menyebarkan pengaruhnya, pergerakan Islam di Hindia Belanda juga telah menyebarkan pengaruhnya di luar Hindia Belanda. Pengaruh dari beragam organisasi pergerakan Islam -terutama Sarekat Islam- di awal tahun berdirinya juga telah meluas hingga ke Timur Tengah.⁷ Hal ini menjadikan arus informasi antara

masing-masing pihak, baik Turki Utsmani dan masyarakat Hindia Belanda telah terjalin lama sehingga masing-masing pihak sudah tidak asing dengan informasi awal mengenai kondisi masyarakatnya.

⁷ Sejak awal-awal Sarekat Islam lahir, organisasi ini memang telah memiliki pengikut di luar Hindia. Pada tahun 1912-1913 ditemukan surat kaleng yang terbit di Mekah yang menjelek-jelekan Sarekat Islam. Dikatakan oleh surat kaleng ini bahwa Sarekat Islam bukanlah organisasi Islam yang ingin memperjuangkan kepentingan umat Islam. Fitnah ini muncul karena ketidaksukaan pihak pemerintah Hindia Belanda terhadap pengaruh Sarekat Islam yang sudah menarik hati banyak masyarakat Hindia Belanda yang

kawasan Hindia Belanda dan Timur Tengah menjadi lebih dinamis dan tidak menjadi satu arah. Dalam konteks ini, berita mengenai perkembangan Turki Utsmani yang sampai ke Hindia Belanda juga didapat melalui saluran media massa, terutama sekali media massa yang dikelola oleh organisasi pergerakan (Islam).

Kabar mengenai dinamika Turki Utsmani menjelang keruntuhannya telah diikuti oleh umat Islam Hindia Belanda, terutama ketika Turki Utsmani terlibat dalam Perang Dunia I hingga dihapuskannya jabatan khalifah.⁸ Awalnya, beberapa surat kabar (dengan “semangat” Islam) lokal banyak menurunkan berita mengenai beberapa peristiwa di Turki, seperti surat kabar *Otoesan Hindia*⁹ dan terutama majalah *Bintang Islam*.¹⁰ *Otoesan Hindia* kemudian secara berturut-

bermukim di Mekah. Lihat, Mohammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat 1900-1950*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2001), h. 137-138.

⁸ Dalam konteks ini, Turki Utsmani menggunakan konsep kekuasaan Sultan-Khalifah, dimana kekuasaan politik ada dalam jabatan sultan dan kekuasaan spiritual ada dalam jabatan khalifah. Pada tahun 1922 jabatan Sultan ditiadakan. Namun begitu jabatan khalifah masih dipertahankan namun tanpa kekuasaan duniawi. Dalam konteks ini jabatan khalifah hanya sebagai simbol teologis semata yang tidak memiliki wewenang dalam urusan politik pemerintahan. Namun pada perkembangannya, khalifah saat itu, Abdul Majid II, dinilai masih memiliki pengaruh yang kuat. Melihat perkembangan tersebut, pada 3 Maret 1924 M, melalui Majelis Nasional Turki, Mustafa Kamal secara resmi menghapuskan institusi kekhilafahan Turki Utsmani. Dengan demikian, sistem pemerintahan yang selama ratusan tahun telah dijalankan Turki ini runtuh. Kemudian penguasa Utsmani saat itu, khalifah Abdul Majid II, dideportasi dari Turki dan Turki bertransformasi menjadi negara republik. Baru kemudian di tahun 1924 jabatan khalifah juga dihapus. Ahmad Syukri, *Merekam Jejak Nasionalisme dalam Dunia Islam*, (Jakarta: Hayfapress, 2007), h. 73-74.

⁹ *Otoesan Hindia* terbit setelah Sarekat Islam mengadakan kongres lokal pertamanya di Surabaya, 26 Juli 1913. Dipimpin pertama kali oleh H.O.S Tjokroaminoto, *Otoesan Hindia* menjadi salah satu surat kabar berbahasa Melayu milik Sarekat Islam yang paling berpengaruh di samping surat kabar lain yang dimiliki Sarekat Islam seperti *Sinar Djawa* di Semarang, *Pantjaran Warta* di Betawi dan *Saroetomo* di Surakarta. *Otoesan Hindia* selama 13 tahun *concern* memberitakan mengenai pergerakan politik, ekonomi, dan perburuhan. *Otoesan Hindia* juga mempunyai pengaruh luas terhadap surat kabar yang terbit di daerah-daerah serta memiliki jumlah oplah yang mencapai ke luar Hindia Belanda yang tiak bisa dilepas dari peran serta pengaruh Sarekat Islam sendiri. Abdurrachman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2002), h. 85-86.

¹⁰ *Bintang Islam* adalah media massa cetak yang terbit melalui kerjasama antara Muhammadiyah dan Sarekat Islam. Terbit ditahun 1923, *Bintang Islam* dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan umat Islam di Hindia Belanda, dengan H. Fachroddin dari Muhammadiyah dan H.O.S. Tjokroaminoto dari SI sebagai pemimpin redaksinya. *Bintang Islam* menjadi majalah dwi mingguan Islam yang dikelola secara professional. Tirasnya mencapai 1500 eksemplar dan menjangkau hingga Singapura, Perak dan Johor. *Bintang Islam* memuat berita seputar Islam di tanah air dan luar negeri. Bahkan Moh. Hatta pernah menjadi koresponden *Bintang Islam*, saat ia masih di Amsterdam. Lihat, Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elit Muslim dalam Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Mizan Publika, 2012), h. 308-309. Berita mengenai Turki Utsmani juga banyak dimuat di dalam majalah ini.

turut menyuguhkan berita tentang peristiwa perang yang terjadi di Eropa.¹¹ Hal ini juga menunjukkan luasnya jangkauan peredaran surat kabar *Otoesan Hindia*. Selain itu, berita mengenai kemenangan Mustafa Kemal (lebih) banyak didapatkan oleh H. Agus Salim. Agus Salim merupakan orang yang kemudian memiliki gagasan pertama untuk mengirimkan ucapan selamat kepada Mustafa Kemal atas kemenangannya.¹²

Posisi Agus Salim (dan juga Tjokroaminoto) merupakan posisi sebagai tokoh pergerakan yang strategis dalam kaitannya dengan perolehan arus informasi mengenai Turki Utsmani dan termasuk juga mengenai informasi lain yang berasal dari luar kawasan luar Hindia Belanda. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, bahwa dwitunggal ini adalah pemimpin (utama) Sarekat Islam, dimana Sarekat Islam sendiri mampu menjadi organisasi Islam terbesar di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto dan Agus Salim. Dengan posisi ini maka upaya untuk mengorganisir beragam informasi menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

¹¹ Selain *Otoesan Hindia*, ada beragam media massa -dengan beragam ideologi dan kepentingan- yang sezaman dengan kejadian PD I di Hindia Belanda yang memberitakan mengenai berbagai peristiwa di luar negeri. Hal ini menandakan arus informasi telah demikian terbuka dan tidaklah sulit untuk diakses walau dalam beberapa hal masih mengalami kendala.

¹² Pengiriman mosi ucapan selamat kepada Mustafa Kemal tidak terlepas dari kondisi sosial politik Turki Utsmani. Pada Agustus 1920, Turki terlibat dalam perjanjian Sevres. Peristiwa ini akhirnya sampai ke Hindia Belanda. Muhammadiyah kemudian mengirimkan resolusi berupa protes penolakan terhadap perjanjian Sevres karena dianggap memecah belah kesatuan umat Islam. Resolusi ini disampaikan melalui pemerintah Belanda, namun tidak ditindaklanjuti. Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, dalam *Jurnal Studia Islamika*, Vol 2, No. 3, tahun 1995, h. 117. Pasca perjanjian Sevres pihak nasionalis Turki dapat memegang kendali atas Turki dan memaksa pihak sekutu untuk kembali berunding dengan Turki, peristiwa ini juga akhirnya sampai di Hindia Belanda, dan Mustafa Kemal kemudian dianggap sebagai pahlawan Islam. Dalam konteks ini dapat pula dikatakan bahwa Agus Salim adalah orang yang sangat (dan paling) *concern* dengan pemberitaan mengenai Turki Utsmani. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya surat kabar yang langsung diketuai oleh Agus Salim, yaitu surat kabar *Doenia Islam* (terbit pertama penghujung tahun 1922) dan *Neratja* (terbit tahun 1923). Di dalam kedua surat kabar ini, pemberitaan mengenai peristiwa-peristiwa luar negeri, terutama tentang Turki Utsmani rutin diberitakan. Karena begitu “bersemangat” dengan Turki (termasuk Pan-Islam), Agus Salim kemudian dijuluki sebagai seorang *Pan-Islamist*. Dapat lihat, Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia: The Umma Below The Wind*, (London: Routledge Curzon, 2003), h. 206-210.

Kedua, posisi dwitunggal ini dalam dunia kewartawanan (media massa). Dalam konteks ini maka sangat memungkinkan bagi mereka untuk memperoleh informasi mutakhir mengenai perkembangan dunia Islam sehingga mereka memiliki peluang besar pula untuk memperluas wawasan berpikir dan mengantisipasi berbagai informasi mengenai dunia Islam dengan langkah-langkah strategis. Karena itu, melalui dunia media ini pula nampaknya (besar kemungkinan) Agus Salim memiliki akses (langsung) terhadap informasi mengenai Turki Utsmani. Hal ini didukung pula dengan kemampuan berbahasa asing dari Agus Salim.¹³

Kabar mengenai perkembangan Turki yang masuk ke Hindia Belanda selanjutnya dapat dilacak dalam pemberitaan-pemberitaan media massa Islam. Adalah *Bintang Islam* yang menampilkan artikel yang ditulis oleh Moh. Hatta di Rotterdam, mengenai munculnya gerakan Turki Muda, sejarah kekhalifahan modern, dan penegasan Mustafa Kemal atas kemerdekaan Turki. Tulisan-tulisan ini dimuat dalam terbitan *Bintang Islam* dari bulan Oktober 1923 hingga April 1924. Sebelum peristiwa pemecatan Abdul Majid II dari posisi khalifah, *Bintang Islam* bahkan pernah menampilkan foto-foto Mustafa Kemal berdampingan dengan Abdul Majid II. Penampilan foto ini merupakan upaya untuk memperkenalkan Abdul Majid II sebagai pemimpin umat Islam sedunia.¹⁴ *Bintang*

¹³ Wardini Akhmad, *Kongres Al-Islam 1922-1941: Satu Telaah tentang Integrasi dan Disintegrasi Organisasi-organisasi Islam di Indonesia dalam Perkembangan Pergerakan Nasional*, (Jakarta: Disertasi Program Doktor IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), h. 96-97. Fungsi media massa disadari dengan baik oleh para tokoh pergerakan. pers pun memberikan pengaruh secara lintas batas. Berbagai peristiwa besar yang terjadi di luar negeri, semisal kemenangan Jepang terhadap Rusia (1905), Revolusi Cina di bawah Sun Yat Sen (1911), dan berbagai pergolakan lain memancarkan banyak pengaruh bagi perjuangan bangsa Indonesia (Hindia Belanda). Diduga pengaruh seperti ini, hanya dapat dipancarkan melalui pers (media massa). Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru...*, h. 115.

¹⁴ Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia...*, h. 211.

Islam bahkan selalu menuliskan nama Mustafa Kemal dengan gelar *ghazy* atau panglima. Hal ini dilatarbelakangi dengan begitu seringnya pemberitaan mengenai Turki Utsmani dan sepak terjang Mustafa Kemal dalam *Bintang Islam*.

Maka, kabar mengenai pemecatan Abdul Majid II menjadi sangat mengejutkan. Oleh karena kekuasaan khalifah yang dijabatnya tidak saja diakui oleh bangsa Turki saja, tetapi seluruh bangsa-bangsa muslim di dunia, termasuk oleh kaum muslimin di Indonesia.¹⁵ Ia merupakan simbol supremasi politik umat Islam, malah Istanbul, ibu kota Turki, oleh Barat dianggap sebagai simbol Dunia Timur umumnya.¹⁶

Kabar mengenai pemecatan Abdul Majid II, yang menandai runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani pada 3 Maret 1924,¹⁷ kemudian dapat pula ditelusuri dari pemberitaan di *Bintang Islam*.¹⁸ Kabar keruntuhan Turki ini kemudian dimuat dalam surat kabar *Bintang Islam* pada terbitan tanggal 10 April 1924 dan ditanggapi dengan respon *apologetic* dan bukan dengan respon kemarahan.¹⁹ Hal ini dapat dilihat dalam kutipan *Bintang Islam* berikut:

.....*pemboeangan Chalif dari daerah Toerki jang bersangkoet dengan keamanan Republik Toerki ta' boleh dipandang bahwa Toerki membelakangi doenia Islam.....bahwa Chalif Abdoel Medjid dipetjat dan akan dioesir dari dalam daerah Toerki meloekai hati orang Moeslimin.....*

¹⁵ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 242.

¹⁶ Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 83.

¹⁷ Dinamika Turki menjelang penghapusan institusi kekhilafahan dapat lihat, Reza Pankhurst, *The Inevitable Caliphate? A History of The Struggle for Global Islamic Union, 1924 to The Present*, (New York: Oxford University Press, 2013), h. 31-35.

¹⁸ Peneliti sendiri belum mengetahui lagi secara detail, surat kabar ataupun saluran informasi lain di Hindia Belanda yang memberitakan mengenai peristiwa ini. Pun begitu, pemberitaan mengenai Turki Utsmani di Hindia Belanda lebih banyak diikuti oleh golongan pembaharu terutama para elit Sarekat Islam dan Muhammadiyah.

¹⁹ Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia....*, h. 212.

Respon *apologetic* ini nampaknya dapat dipahami sebagai sikap yang muncul akibat kurangnya informasi mengenai Turki -terutama mengenai Mustafa Kemal- serta tidak adanya pengaruh langsung peristiwa ini terhadap umat Islam Hindia Belanda. Umat Islam Hindia Belanda yang sebelumnya telah menyanjung Mustafa Kemal tidak dapat langsung mengubah sikapnya secara cepat begitu peristiwa pemecatan ini terjadi. Respon selanjutnya, *Bintang Islam* kembali mengajak umat Islam sedunia untuk kembali merevitalisasi jabatan khalifah dengan tetap memfokuskan posisi kekhalifahan di Turki.²⁰

Berangkat dari kenyataan ini dapat pula disimpulkan bahwa meskipun teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat, namun masih tetap memiliki keterbatasan kala itu. Informasi yang sampai tidak secara *real time*, dapat memunculkan distorsi informasi. Dalam konteks ini, distorsi informasi menyebabkan informasi yang masuk hanya sebagian kecil saja. Hal ini terjadi karena terlambat dan kurangnya informasi utuh yang masuk. Distorsi informasi inilah yang menjadikan tidak responsifnya (elit) umat Islam Hindia Belanda atas peristiwa penghapusan kekhalifahan di Turki.

Kabar lanjutan yang berkembang kemudian juga kembali disampaikan dalam terbitan *Bintang Islam* tanggal 25 April 1924. Moh. Hatta yang merupakan koresponden dari surat kabar *Bintang Islam* menyampaikan informasi sesungguhnya mengenai peristiwa pemecatan ini. Moh. Hatta kemudian melanjutkan bahwa dalam peristiwa runtuhnya Turki Utsmani ini harus dibarengi pula dengan suatu tindakan yang penting untuk dilakukan dalam rangka mengatasi

²⁰ Lihat, *Bintang Islam*, 10 April 1924. Hal ini kemudian berlangsung hingga Mustafa Kemal mengumumkan program sekularisasinya di Turki. Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 120.

krisis umat Islam. Hatta mengingatkan para pembaca *Bintang Islam* bahwa masalah khilafah bukanlah masalah dan tanggung jawab Turki semata. Hatta meneruskan sarannya agar masyarakat Islam di Hindia Belanda haruslah terlibat aktif dalam segala sangkut pautnya dengan urusan kekhilafahan ini.²¹

Begitulah, berita mengenai perkembangan Turki Utsmani telah lama diikuti oleh umat Islam Hindia Belanda. Dari beragam saluran komunikasi massa, saluran media massa menjadi saluran yang berperan penting dalam penyebaran informasi mengenai Turki kepada khalayak ramai. Pemberitaan mengenai runtuhnya Turki Utsmani pada akhirnya juga meresap masuk dalam alam informasi umat Islam di Hindia Belanda walau dengan segala keterbatasan. Kabar keruntuhan ini akhirnya direspon dengan beragam tindakan oleh umat Islam Hindia Belanda.²²

C. Sarekat Islam sebagai *Role Leader* Wacana Pan-Islam

Tanpa mengenyampingkan peran serta kontribusi organisasi pergerakan Islam yang lain, Sarekat Islam di awal abad ke-20 M dapat dikatakan sebagai organisasi pergerakan Islam yang paling *concern* dengan permasalahan Islam-politik. Dalam konteks politik, maka Sarekat Islam berupaya mempertahankan

²¹ Laffan kemudian membahasakan pemberitaan yang disampaikan Moh. Hatta ini dengan istilah “kebenaran yang mengerikan” (*awful truth*). Lihat, Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia...*, h. 212.

²² Secara luas, berita keruntuhan Turki (dalam hal ini penghapusan jabatan khalifah) juga mendatangkan berbagai respon dari umat Islam di dunia. Tak cukup disitu, bahkan beberapa negara imperialis/penjajah juga seperti ingin mengadopsi lembaga dan jabatan khalifah ini demi kepentingan negara koloni/jajahan mereka. Tujuannya terutama sekali untuk menghilangkan pengaruh Turki di kawasan koloninya. Terkait dinamika respon umat Islam di beberapa kawasan lain hingga negara imperialis dapat lihat, Salih Pay, *The Journey of Caliphate from 632 to 1924*, dalam *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 6, No. 4, April 2015, h. 113-115. Lihat pula, Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (terj: Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati), (Jakarta: Serambi, 2006), h. 559-581.

kepemimpinan serta pengaruhnya di dalam gerakan-gerakan Islam yang telah ada.²³ Ketika runtuhnya Turki Utsmani yang diikuti dengan upaya revitalisasi lembaga khilafah, Sarekat Islam dapat dilihat sebagai pihak yang memiliki andil (paling) besar dalam memobilisasi berbagai respon dibandingkan dengan organisasi yang lain. Dalam konteks ini maka Sarekat Islam berupaya memainkan peranan yang sentral dalam konteks politik Islam di Hindia Belanda.

Dalam konteks anatomi organisasi pergerakan Islam Indonesia, Sarekat Islam adalah salah satu organisasi politik Indonesia abad XX M yang paling menonjol. Malah boleh dikata bahwa maju mundurnya posisi umat Islam di Indonesia ditentukan oleh maju mundurnya Sarekat Islam. Hal ini dimungkinkan karena organisasi ini pada perkembangannya dianggap sebagai satu-satunya “partai politik” bagi orang Islam dari semua golongan, mengingat dari sekian jumlah organisasi Islam mayoritas berbasis pada bidang sosial dan pendidikan.²⁴

Namun begitu, hal tersebut bukanlah sesuatu yang sengaja dan secara terstruktur dilakukan oleh Sarekat Islam, melainkan sesuatu yang dapat dianggap sebagai kewajaran. Hal ini dapat dipahami dalam tiga aspek. Pertama, tidak mungkin Sarekat Islam yang menjadi organisasi²⁵ -dalam hal ini partai- Islam

²³ Di antara organisasi Islam modern yang muncul di awal abad ke-20 M, Sarekat Islam merupakan organisasi yang *holistik* dengan bergerak di semua bidang kegiatan, walau diawali dengan kegiatan di bidang ekonomi dan agama. Pasca mengadakan kongres nasionalnya yang pertama, SI naik secara perlahan dalam panggung politik Hindia Belanda, walau masih belum secara terang-terangan menyatakan tujuan politiknya. Naiknya SI dalam panggung politik juga menandakan bahwa secara praktis SI merupakan organisasi yang mewakili aspirasi masyarakat (Islam) Hindia Belanda dalam badan *Volksraad* yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Namun akhirnya, SI menempuh jalan non-kooperatif dengan keluar dari *Volksraad*. Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan, Jilid I*, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 123-126. Di titik ini, SI dan juga BU -walaupun tidak mendeklarasikan diri sebagai partai politik- dapat dikatakan sebagai partai politik (praktis) pertama di Indonesia.

²⁴ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 114.

²⁵ Dalam konteks masa penjajahan kolonial/pergerakan nasional, istilah organisasi juga dapat mengacu pada istilah partai (politik). Di masa itu, semua organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan bahkan politik sendiri merupakan sebuah partai -dengan keanekaragaman pola- yang

hanya menjadi penonton dalam permasalahan yang muncul dan yang bersangkutan dengan umat Islam pada umumnya. Kedua, walaupun Sarekat Islam memiliki gagasan pembaharuan dalam agama, Sarekat Islam kurang terlibat dalam masalah-masalah yang dipertikaikan antara golongan pembaharu dengan golongan tradisional. Ketiga, walaupun dalam masa mundurnya, Sarekat Islam masih mempunyai pengikut yang lebih banyak dari organisasi manapun pada masa itu. Selain itu Sarekat Islam juga lebih bersifat nasional dibandingkan dengan organisasi Islam yang lain, ditambah para pemimpinnya lebih mempunyai pengalaman dalam urusan organisasi.²⁶

Pada periode 1920-an, arah gerak Sarekat Islam tidak hanya semata-mata berhubungan dengan penentangan terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Dalam periode ini Sarekat Islam memiliki perhatian lebih dalam bidang keagamaan dan politik Islam, baik politik Islam yang bersifat lokal maupun internasional. Hal ini tidak terlepas dari perubahan dasar partai yang terjadi pada periode sebelumnya.²⁷ Keruntuhan Turki Utmani disebut memunculkan spekulasi serius terkait masa depan politik (kepemimpinan) dalam Islam secara luas.²⁸ Dalam konteks ini Sarekat Islam ingin menunjukkan peranannya dalam merespon

memainkan peranan penting dalam menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 423.

²⁶ Terkait dengan jumlah anggota Sarekat Islam, pada tahun 1915, Sarekat Islam telah memiliki 500.000 anggota, dan enam tahun kemudian yaitu tahun 1921 anggotanya telah mencapai 2.000.000 orang serta telah terbentuk cabang-cabang SI di seluruh kawasan di Hindia Belanda kecuali Irian Barat. Lihat, Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 151-152.

²⁷ Perubahan tersebut terjadi dalam kongres Sarekat Islam Maret 1921 di Yogyakarta. Pada kongres yang dihadiri oleh 57 Sarekat Islam lokal ini, disusun sebuah deklarasi baru tentang dasar partai oleh Semaun dan H. Agus Salim. Mereka dipercayakan bersama-sama menyusun dasar-dasar partai. Meskipun begitu disebabkan pertikaian antara keduanya, rencana dasar-dasar tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu hasil bersama. Dalam dasar partai yang disepakati pada kongres tersebut, kedudukan Islam dijelaskan dengan lebih luas. Islam diartikan sebagai asas bagi kemerdekaan yang sesungguhnya, melepaskan seluruh rakyat dari segala macam penghambaan. Dengan pandangan seperti ini ditegaskan bahwa kebijakan dan kegiatan-kegiatan Sarekat Islam benar-benar semata-mata berdasar Islam. *Ibid*, 146.

²⁸ Madawi Al-Rasheed, C. Kersten, and Marat Shterin (ed.), *Demystifying The Caliphate*, (New York: Oxford University Press, 2015), h. 100.

isu-isu yang menimpa umat Islam Hindia Belanda. Hal ini dikarenakan posisinya sebagai organisasi yang (dapat dianggap) mewakili umat Islam di Hindia Belanda.²⁹ Karena itu, tidak mengherankan jika Sarekat Islam terlihat menonjol di dalamnya.

Pandangan mengenai politik Islam inilah yang juga mendorong Sarekat Islam berperan dalam beberapa hal yang bersangkutan paut secara langsung dengan umat Islam Hindia Belanda. Hal ini juga terkait dengan pandangan tentang persatuan yang berasaskan Islam, yang turut mendorong Sarekat Islam merespon dan ikut secara aktif dalam permasalahan khilafah. Dengan demikian, Islam yang menjadi dasar partai menjadi alasan mengapa Sarekat Islam begitu bersemangat dalam merespon permasalahan khilafah. Bagi Sarekat Islam, Pan-Islam dan jabatan khalifah telah terbukti dapat menjadi senjata utama dalam melawan penjajahan.

Walau kemudian kekuasaan kekhalifahan di Turki kala itu tidak pernah menyentuh kawasan Hindia Belanda, namun posisi khalifah secara rohani masih mengikat umat Islam secara tradisi. Karena itulah bagi Sarekat Islam, isu mengenai khilafah ini penting untuk mewujudkan cita-cita Pan-Islam yakni persatuan umat Islam seluruh dunia di bawah peraturan hidup Islam. Menurut Tjokroaminoto, Pan-Islam adalah sedalam-dalamnya persatuan di antara umat Islam yang sudah dicontohkan nabi Muhammad saw. Persatuan itu tidak hanya untuk umat Islam di Hindia Belanda tetapi untuk seluruh umat Islam di dunia di bawah suatu peraturan hidup Islam. Tidaklah cita-cita ini menjadi kenyataan

²⁹ Terutama di periode tahun 1921-1927. Sarekat Islam dianggap pula sebagai organisasi yang dapat merangkul umat Islam dari kalangan pembaharu dan juga tradisional. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 152.

kecuali jika Pan-Islam ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.³⁰ Selama beberapa tahun Sarekat Islam dapat dikatakan sebagai *role leader* dalam wacana memerjuangkan Pan-Islam di Hindia Belanda,³¹ terutama sekali ketika ada di bawah pimpinan dwitunggal Tjokroaminoto-Agus Salim.

Di tangan dwitunggal inilah Sarekat Islam menjadikan Pan-Islam sebagai asas dalam perjuangan politiknya. Sebagai perjuangan politik, Sarekat Islam juga dapat dikatakan ingin mencapai tujuan politik yang lebih besar, yang dalam hal ini ingin menunjukkan eksistensinya di dunia internasional. Sebagai organisasi politik-massa (ter)besar di Hindia Belanda, tujuan internasionalisasi gerakan merupakan salah satu tujuan besar yang umum ingin dicapai oleh setiap organisasi. Baik Tjokro dan Agus Salim sama-sama memahami Pan-Islam sebagai sebuah solusi politis baik jangka pendek yaitu terbebas dari penjajahan dan juga jangka panjang yaitu eksistensi organisasi, tanpa mengenyampingkan aspek menjalankan kewajiban spiritual.

Meskipun demikian, wacana Pan-Islam memang lebih terlihat aspek politisnya di tangan Sarekat Islam.³² Oleh karena itu, respon Sarekat Islam terhadap permasalahan khilafah -secara politis- menjadi sesuatu yang alamiah

³⁰ Dapat lihat, *Bandera Islam*, 14 Desember 1924.

³¹ Ada peristiwa penting yang perlu diketahui tentang tanda-tanda adanya pengaruh Turki bagi Sarekat Islam dalam kaitannya dengan gerakan Pan-Islam. Peristiwa itu adalah dikibarkannya bendera Turki oleh peserta Kongres Nasional Sarekat Islam ke-3 di Bandung tahun 1916. Insiden ini tentunya memberikan kecurigaan yang besar Pemerintah kolonial Belanda mengingat Turki waktu itu adalah pemimpin gerakan Pan-Islam dan tengah terlibat perang Dunia I melawan Inggris dan sekutu-sekutunya. Namun begitu, Sarekat Islam bukanlah organisasi yang pertama dalam perjuangan gagasan Pan-Islam. Adalah Jamiat Khair sebagai organisasi Islam pertama yang terlibat langsung dengan Turki Utsmani dan gagasan Pan-Islam.

³² Terdapat motif politik-ekonomi dari Sarekat Islam -di bawah kepemimpinan Tjokroaminoto- yang mengusung Pan-Islam dan pro Turki. Motif tersebut adalah ketergantungan dengan saudagar kaya keturunan Arab di Surabaya yang selalu menyuplai dana untuk pergerakan Sarekat Islam. Namun motif ini ditolak oleh Korver. Menurutnya, Tjokroaminoto menganggap Pan-Islam sebagai fokus perjuangan politik SI karena akan menghadirkan "benih-benih demokrasi" yaitu rasa persamaan antar umat manusia. Jadi dalam pemahaman ini lebih tepat diinterpretasikan bahwa ia mencoba menginisiasi Islam sebagai sarana persatuan bangsa dan jalan perjuangan menuju kemerdekaan. Lihat, A.P.E. Korver, *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil*, h. 239-240.

pula. Wacana akan pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam ini kemudian ditawarkan secara umum kepada para pemuka organisasi Islam lainnya. Secara khusus, respon sekaligus keterlibatan Sarekat Islam dalam masalah khilafah menjadi semakin jelas tergambar ketika Sarekat Islam mengadakan kongres kesebelasnya pada Agustus 1924, lima bulan setelah Majelis Nasional Turki mengumumkan penghapusan khilafah. Kongres yang diselenggarakan di Surabaya ini membahas undangan dari ulama al-Azhar untuk seruan kongres Kairo. Keputusan dalam kongres tersebut adalah Sarekat Islam akan membantu dengan segala kemampuan untuk mengirim utusan dari Hindia Belanda ke Kongres Kairo.³³

Keputusan kongres tersebut mendorong Sarekat Islam untuk mengumpulkan umat Islam dari berbagai organisasi ke dalam sebuah pertemuan untuk membicarakan persoalan khilafah. Selain membahas soal undangan, kongres ini juga menghasilkan keputusan lain yang sangat berperan bagi perjuangan khilafah yakni komitmen Sarekat Islam untuk menerbitkan surat kabar baru yang diberi nama *Bandera Islam*. Surat kabar ini juga diterbitkan dengan semangat Pan-Islam dan dalam rangka mendukung upaya revitalisasi khilafah.

D. Kongres al-Islam dan Pembentukan Komite Khilafah

Dalam jiwa zamannya, umat Islam Hindia Belanda merespon keruntuhan Turki Utsmani dengan upaya-upaya pergerakan, baik sebagai inisiator maupun fasilitator dalam konteks pergerakan nasional. Di masa ini mereka telah terbiasa

³³ Dapat lihat, *Bandera Islam*, 16 Oktober 1924.

merespon suatu permasalahan dengan menggunakan langkah-langkah seperti pembentukan komite-komite, penyelenggaraan kongres dan pertemuan serta pengadaan sarana pendidikan, untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

Perjuangan mereka semakin disempurnakan dengan usaha masif penerbitan surat kabar yang menjadi organ bagi organisasi mereka. Semua upaya ini dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Dalam praktiknya kemudian, pelaksanaan beragam pertemuan, kongres dan upaya penerbitan media ini dikontrol ketat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meskipun begitu, hal ini tetap tidak menyurutkan semangat umat Islam Hindia Belanda.³⁴ Dalam konteks merespon keruntuhan Turki Utsmani, maka upaya-upaya tersebut juga ditempuh oleh umat Islam Hindia Belanda sebagai bentuk respon mereka.

Berbagai upaya yang dilakukan ini secara langsung membuktikan pula bahwa umat Islam Hindia Belanda meyakini posisi Islam yang tidak dapat lepas dari urusan duniawi yang dalam hal ini urusan politik kekuasaan.³⁵ Pemahaman ini kemudian diwujudkan dengan adanya respon dan upaya revitalisasi khilafah yang telah runtuh dan bahkan menjadi isu bersama yang dapat menyatukan berbagai kelompok umat Islam. Lebih jauh, umat Islam Hindia Belanda merasa wajib untuk menjadikan Islam sebagai ideologi politik dan menentang upaya pemisahan Islam dalam kehidupan politik walaupun perspektif politik dengan menggunakan Islam merupakan hal yang dianggap berbahaya di masa penjajahan

³⁴ Di titik ini, beragam upaya dan respon dari kaum pergerakan, selalu bergerak dalam kerangka organisasi bergaya politik Barat. Dalam hal ini termasuk pelaksanaan kongres, perkumpulan, dan yang semacamnya yang bertujuan untuk menghimpun suara dan kemudian menyebarkan suaranya. Begitu pula aktivitas pergerakan umat Islam Hindia Belanda yang juga tidak dapat lepas dari kerangka perjuangan ini. Pihak kolonial sendiri hanya dapat mengontrol -dengan cara mengirim delegasi peninjau/pengamat- dan tidak dapat melarang pelaksanaan pertemuan-pertemuan ini disebabkan berbagai hal. Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia...*, h. 212-213.

³⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, h. 46.

kolonial kala itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Snouck Hurgronje selaku penasehat pemerintah kolonial.³⁶

Meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi ketertarikan umat Islam Hindia Belanda terhadap wacana khilafah sehingga keruntuhan Turki Utsmani -yang berarti keruntuhan institusi politik Islam- direspon dengan antusias. Respon yang ditunjukkan umat Islam di Hindia Belanda juga beraneka ragam, baik yang pro ataupun kontra. Yang menarik adalah keruntuhan Turki Utsmani juga dibarengi dengan upaya revitalisasi kembali kekuasaan Islam melalui berbagai bentuk kegiatan yang dalam hal ini berupa pelaksanaan pertemuan/kongres.

Kongres al-Islam³⁷ merupakan pertemuan bagi umat Islam di Hindia Belanda, yang terpisah dalam berbagai macam organisasi, untuk menyatukan suara dan tenaga mereka. Secara keseluruhan terdapat sembilan kongres yang diadakan dalam jarak waktu yang tidak tertentu sejak 1922 hingga 1932. Periode penyelenggaraan Kongres al-Islam bertepatan dengan munculnya permasalahan khilafah. Pada serial kongres al-Islam ini dibahas berbagai persoalan keagamaan dan respon umat Islam terhadap permasalahan khilafah.³⁸

³⁶ Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 121-122. Inti dari ajaran Snouck Hurgronje terhadap Islam di Indonesia adalah penekanan dan pemisahan secara maksimal ajaran Islam dalam kehidupan politik dan pengangkatan ajaran Islam dalam kehidupan ibadah atau Islam ritual. Terkait buah pikiran Snouck Hurgronje dapat dilihat, Harry J Benda, *Christiaan Snouck Hurgronje and the Foundations of Dutch Islamic Policy in Indonesia*, dalam *The Journal of Modern History*, Vol. 30, No. 4, tahun 1958, h. 338-347.

³⁷ Terkait dengan kongres al-Islam sendiri, pada dasarnya sulit untuk melacak siapa penggagas pertama pelaksanaan kongres ini, namun dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kongres ini bermula pada sosok Agus Salim (sebagai elit SI). Lihat, Wardini Akhmad, *Kongres Al-Islam 1922-1941...*, h. 81.

³⁸ Masyarakat Hindia Belanda yang lain (yang kemungkinan besar beragama Islam) juga mengadakan semacam kongres tandingan. Kongres ini diinisiasi oleh Nationaal Indische Partij dengan nama Kongres Nasional se-Hindia yang diadakan pada tahun 1922 dan menyerukan konsep nasionalisme Hindia. Pada perkembangan selanjutnya, kongres-kongres yang diinisiasi golongan nasionalis juga masih terus berlangsung. Lebih jauh lihat, Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), h. 115-120. Terkait kongres al-Islam di Hindia Belanda, dapat dilihat secara lengkap dalam

Pelaksanaan kongres secara terbuka adalah wujud nyata dari respon umat Islam atas permasalahan yang menyimpannya. Hal ini menandakan pula adanya semangat ingin menyatukan sikap dan tujuan dengan cara-cara yang disepakati, serta adanya keinginan untuk dapat duduk bersama dan menjadikan berbagai persoalan menjadi persoalan bersama untuk dicarikan solusinya. Di samping itu, penggunaan al-Islam sebagai nama yang mengiringi kongres, dapat dipahami sebagai upaya menjadikan kongres sebagai forum yang inklusif. Hal ini penting mengingat di masa pergerakan nasional, beragam organisasi muncul dengan latar dan tujuan masing-masing. Penggunaan nama dan momentum yang tepat dapat menjadi salah satu penarik dalam menyatukan beragam organisasi dalam satu tujuan yang sama.

Kongres al-Islam pertama diadakan di Cirebon pada tahun 1922. Tiga organisasi (besar) Islam berpartisipasi dalam kongres ini. Mereka adalah Sarekat Islam, Muhammadiyah dan al-Irsyad. Turut hadir golongan tradisional yang dipimpin oleh K.H. Abdul Wahab berasal dari sebuah lembaga pendidikan *Tasywirul Afkar* di Surabaya dan K.H. Asnawi, seorang ulama terkenal di Kudus.³⁹ Oleh karena itu, Kongres al-Islam ini terutama membicarakan masalah-masalah agama, di mana Muhammadiyah dan al-Irsyad di satu pihak sebagai golongan pembaharu dan golongan tradisional di pihak lain mempunyai

Wardini Akhmad, *Kongres Al-Islam 1922-1941: Satu Telaah tentang Integrasi dan Disintegrasi Organisasi-organisasi Islam di Indonesia dalam Perkembangan Pergerakan Nasional*, (Jakarta: Disertasi Program Doktor IAIN Syarif Hidayatullah, 1989).

³⁹ Secara lengkap pihak dari organisasi Islam yang hadir antara lain, Sarekat Islam, Muhammadiyah, al-Irsyad, Perserikatan Ulama, Musyawaratul Ulama, Tasywirul Afkar, Jam'iyat al-Khayr, Syamail Huda, and Nahdlatul Wathon. Secara personal hadir pula K.H. Bratanata dari Cirebon and Sayyid Alwi Ali Aydrus, H. Asnawi dari Kudus, Ahmad Surkatie, H. Fachruddin, K.H Abdul Wahhab dari Surabaya dan Muhammad Fadlullah dari Banjarnegara. Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia...*, h. 212. Secara umum kongres ini dihadiri tidak kurang dari 40 perkumpulan dengan 500 orang peserta. Wardini Akhmad, *Kongres Al-Islam 1922-1941...*, h. 107.

perbedaan pendapat, maka kongres tersebut memilih Sarekat Islam sebagai pimpinan.⁴⁰ Dalam kongres ini pula, H. Agus Salim untuk pertama kalinya mengemukakan tentang pentingnya persatuan di antara umat Islam. Gagasan Pan-Islam digulirkan oleh Agus Salim sebagai suatu upaya mencapai persatuan dan kerjasama antar umat Islam terhadap permasalahan yang berhubungan dengan Islam.⁴¹

Perkembangan situasi di Turki kembali mendapat respon pada kongres setelahnya yakni pada kongres al-Islam kedua yang diadakan di Garut tanggal 19-21 Mei 1924.⁴² Sepanjang dua bulan sebelum kongres berlangsung, terjadi peristiwa penghapusan khilafah oleh Majelis Nasional Turki yang disusul dengan seruan ulama al-Azhar untuk mencari khalifah baru, dan proklamasi sepihak dari Syarif Husein di Mekkah sebagai khalifah umat Islam. Oleh karena itu, kongres yang dipimpin oleh Agus Salim dan pengurus besar Muhammadiyah ini fokus

⁴⁰ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 152. Kongres al-Islam pertama ini juga menunjukkan bahwa Sarekat Islam ingin menunjukkan diri sebagai organisasi yang dapat merangkum semua golongan, menjembatani perbedaan pendapat, serta dapat pula menjadi wakil representatif bagi gerakan-gerakan dan paham keagamaan Islam di Hindia Belanda. Wardini Akhmad, *Kongres Al-Islam 1922-1941...*, h. 101.

⁴¹ Mukayat, *Haji Agus Salim dan Pengabdianannya*, (Jakarta: Depdikbud, 1985), h. 39. Seruan ini tidak lepas pula dari meruncingnya perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Kongres al-Islam pertama sendiri sebenarnya memiliki dua tujuan yaitu untuk mengurangi perselisihan di kalangan umat Islam mengenai perkara-perkara “*furū*” dan “*khilafah*” dan menyerukan persatuan umat Islam di bawah kepemimpinan khilafah. Dalam soal keagamaan, terdapat diskusi yang sengit antara kaum muda dan kaum tua yang menyebabkan hampir saja kongres menjadi gagal. Dalam kongres ini pula Tjokroaminoto melahirkan konsep sosialisme Islam. Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), h. 307. Walau begitu, kongres akhirnya dapat menemui titik komprominya. Pun begitu, kongres tidak dapat menyatukan hati antara kaum muda dan kaum tua. Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 247-248. Walau begitu, Kongres al-Islam pertama ini dapat dikatakan berhasil karena dapat menyatukan golongan pembaharu dan tradisional dalam wadah Majelis Ulama. Wardini Akhmad, *Kongres Al-Islam 1922-1941...*, h. 142-144. Dalam konteks politik, -dalam hal ini Pan-Islam dan kaitannya dengan Turki, terutama terhadap Mustafa Kemal- pertentangan antara kaum muda dan kaum tua tidak terlihat dengan jelas dimana agenda pengiriman mosi kepada Mustafa Kemal kemudian disepakati secara aklamasi. Lihat, *Ibid*, 113-119.

⁴² Tidak seperti kongres pertama, kongres kedua ini tidak banyak diliput oleh media massa.

pada persoalan-persoalan politik dengan tujuan untuk menjadikan Islam sebagai kekuatan politik⁴³ dan muaranya adalah membahas persoalan khilafah.

Dalam pidato pembukaan, H. Agus Salim menempatkan peristiwa di Timur Tengah tersebut dalam konteks perjuangan antara dunia Islam dan pemerintah kolonial. Menurutnya, hubungan antara negeri-negeri Muslim buruk, persatuan mereka telah rusak, dan khalifah hanya hidup dalam khutbah Jum'at. Di berbagai tempat mereka dikuasai oleh bangsa asing. Di Ankara, khalifah telah dipecat dan tidak ada khalifah baru di Istanbul. Kemudian Agus Salim menegaskan, kongres al-Islam ini perlu mencari persatuan oleh karena itu merupakan sebuah kewajiban dalam mencari solusi atas permasalahan khilafah. Bagi Agus Salim keberadaan sebuah pemerintahan muslim yang merdeka adalah suatu hal yang penting.⁴⁴

Dari penyelenggaraan Kongres al-Islam pertama dan kedua ini dapat dipahami pula bahwa Turki Utsmani di antara golongan modern dan tradisional dapat diposisikan sebagai pemersatu isu, ketika pada pelaksanaan kedua kongres ini agenda-agenda lain yang dibahas cenderung tidak menemukan jalan keluar. Ketika pada Kongres al-Islam pertama dimanapengiriman mosi kepada Mustafa Kemal yang disepakati secara aklamasi menjadi penanda bahwa isu di Turki ternyata menarik minat yang sama antara kedua golongan ini. Pada Kongres al-Islam kedua pun, isu mengenai Turki masih menjadi pemersatu, walau dengan

⁴³ Kongres al-Islam kedua ini sama sekali tidak membahas mengenai hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan masalah (ibadah) keagamaan. Dalam konteks ini maka pelaksanaan kongres al-Islam kedua ini didorong dengan pemahaman -para penyelenggara, terutama SI- utama bahwa Islam juga mengurus persoalan politik (dunia) dan tidak hanya mengurus soal keakhiratan semata. *Ibid*, 161.

⁴⁴ Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 121. Pidato Agus Salim ini terekam dalam beberapa pemberitaan surat kabar sebagai pidato yang panjang lebar dan memakan waktu yang lama sekali. Wardini Akhmad, *Kongres Al-Islam 1922-1941 ...*, h. 158.

penyikapan yang berbeda pada Kongres al-Islam pertama. Selain itu, kedua penyelenggaraan kongres ini juga semakin menegaskan akan posisi Sarekat Islam -dan terutama Agus Salim- sebagai *role leader* dari wacana Pan-Islam yang berkaitan dengan kekhilafahan di Turki Utsmani

Sementara itu, Syarif Husein berusaha untuk mendapatkan dukungan atas jabatan khalifahnyanya dari umat Islam di Hindia Belanda. Bahkan cukup banyak jamaah haji Hindia Belanda yang hadir di Mekah selama upacara penetapan dirinya sebagai khalifah.⁴⁵ Dia juga membentuk Dewan Khilafah yang terdiri dari sembilan orang sayyid ditambah 19 orang perwakilan dari daerah lain, termasuk dua orang dari Hindia Belanda. Dewan Khilafah ini tidak berumur lama karena tidak beberapa lama kemudian Syarif Husein kehilangan kekuasaannya.⁴⁶

⁴⁵ Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 122. Terkait naiknya Syarif Husein yang menginginkan jabatan khalifah setelah penghapusan khalifah Turki Utsmani, tidak terlepas dari situasi geopolitik kawasan Timur Tengah di awal abad ke-20 M. Pada tahun 1908 di negeri-negeri Arab timbul gerakan kebangsaan untuk mendirikan pemerintahan sendiri (Pan-Arab). Di dalam konferensi Nasional Arab yang pertama di Paris pada tahun 1913, antara lain diputuskan untuk mengajukan keinginan-keinginan bangsa Arab ini kepada pemerintah Turki. Tuntutan nasional ini ditentang oleh kaum reaksioner Turki yang tergabung dalam partai *al-Ittihad wal-Traqqi* yang pada waktu itu memegang kendali pemerintahan. Pada saat meletus Perang Dunia I (1914-1918), memberi peluang bagi bangsa Arab untuk menggapai cita-citanya. Pada Perang Dunia I Turki memihak kepada Jerman melawan sekutu (Inggris). Untuk melumpuhkan gerakan tentara Turki di medan perang sebelah timur, Inggris mengutus kolonel Lawrence ke jazirah Arab (*Lawrence of Arabia*) buat membujuk bangsa Arab agar mengangkat senjata terhadap Turki dan berperang di pihak sekutu. Setelah itu, Sir Henry Mc Mahon raja muda Inggris di Mesir mengadakan perundingan dengan raja Syarif Husein wali dari wilayah Hijaz. Perjanjian di sepakati antara Inggris dan Syarif Husein. Sir Henry Mc Mahon atas instruksi pemerintahan Inggris, berjanji memberi kemerdekaan kepada negara-negara Arab termasuk Palestina. Syarif Husein berjanji memihak Inggris dengan mengobarkan revolusi Arab dan berperang melawan Turki. Pada waktu bersamaan Inggris juga mengadakan perjanjian rahasia dengan Perancis (perjanjian Sykes-Picot) untuk membagi-bagi negeri Arab yang berada di bawah kekuasaan Turki. Hal ini pada akhirnya juga berujung pada naiknya Abdul Aziz bin Sa'ud menggantikan Syarif Husein. Terkait dinamika Syarif Husein dengan Turki lihat, M.Nur El Ibrahimy, *Tragedi Palestina*, (Bandung: Alma'arif, 1955), h. 5-7. Lihat pula, Abdurrahman al-Wasithi dan Abu Fatiah al-Adnani, *Renungan Akhir Zaman*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 100-111. Perkembangan geopolitik di Timur Tengah ini juga dicatat oleh Snouck Hurgronje. Lihat, E. Gobe dan C. Andriaans, *Nasehat-nasehat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936* (terj: Sukarsih), (Jakarta: INIS, 1994), h. 1842.

⁴⁶ Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 86.

Meskipun begitu, di Hindia Belanda sendiri Syarif Husein tidak mendapatkan tanggapan dari umat Islam⁴⁷ kecuali dari kalangan Sayyid. Dukungan dari para sayyid ini dapat dibaca sebagai dukungan berdasarkan garis keturunan yang sama. Dalam banyak pemberitaan di media massa Islam di Hindia Belanda, posisi Syarif Husein juga dianggap oleh umat Islam pribumi sebagai pengkhianat yang justru menghancurkan Islam. Pada dasarnya usahanya untuk menjadi khalifah yang baru ditolak oleh umat Islam sedunia. Hal ini didasari atas upayanya yang mengobarkan perlawanan terhadap Turki Utsmani dalam peristiwa revolusi Arab yang pada akhirnya dianggap sebagai pengkhianatan kepada umat. Syarif Husein kemudian dicap telah menjadi kaki tangan Inggris yang menyebabkan menguatnya penjajahan Inggris di kawasan Hijaz.

Di sisi yang lain, ada pula seruan dari ulama al-Azhar untuk segera mencari khalifah yang baru. Dalam pertemuan yang diadakan di Mesir tanggal 25 Maret 1924 tersebut telah diputuskan pentingnya lembaga khalifah bagi umat. Seruan ini kemudian mendapat respon dari umat Islam di Hindia Belanda. Pada akhir Maret 1924 di bawah pimpinan Syaikh al-Azhar, para ulama menyelenggarakan pertemuan (kongres) di Kairo. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa keberadaan khilafah yang memimpin umat Islam tidak dapat dipungkiri merupakan sebuah keharusan. Mereka juga berpendapat kedudukan Abdul Majid II sebagai khalifah sudah gugur setelah dia diusir dari Turki. Oleh sebab itu harus

⁴⁷ Dalam konteks ini, oleh umat Islam (pribumi) Hindia Belanda, Syarif Husein dicap pula sebagai boneka imperialis. Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 122. Lihat pula, *Bandera Islam*, 9 Oktober 1924. Secara luas, Syarif Husein hanya memperoleh dukungan dari umat Islam di Yordania. Secara umum, umat Islam di berbagai belahan bumi lain menganggap klaim khilafah yang dilakukan oleh Syarif Husein tidaklah sah karena tidak memenuhi konsensus dari umat muslim dunia. Lihat, Martin Kramer, *Islam Assembled: The Advent of The Muslim Congresses*, (New York: Columbia University Press, 1986), h. 83.

ada pengganti khalifah selanjutnya. Untuk membahas siapa yang layak menjadi khalifah, mereka memutuskan akan mengadakan kongres di Kairo pada Maret 1925 dengan mengundang wakil-wakil dari umat Islam di seluruh dunia.⁴⁸

Sekitar pertengahan tahun 1924 undangan kongres tersebut diterima oleh beberapa tokoh Arab dan asosiasi Arab di Jakarta dan Surabaya. Beberapa penerima mendekati Tjokroaminoto dan mengusulkan untuk mengirimkan sebuah delegasi dari Hindia Belanda. Untuk memutuskan apakah sebuah delegasi perlu dikirim dan posisi apa yang harus diambil, maka pada 4-5 Oktober 1924 para pemimpin Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Al-Irsyad mengadakan sebuah pertemuan di Madrasah “Tarbiatoel Aitam”, Genteng, Surabaya. Selain para pemimpin nasional dan lokal dari organisasi tersebut, pertemuan ini juga banyak dihadiri ulama-ulama besar, baik dari kalangan orang Arab maupun orang Jawa.⁴⁹

Menarik untuk dicermati bahwa undangan kongres yang penting ini ternyata diterima oleh golongan Arab maupun keturunan Arab. Tidak adanya golongan pribumi yang menerima langsung undangan kongres ini nampaknya dapat dipahami dari dua hal. Pertama, akses informasi yang lebih mudah dan cepat yang dapat diakses oleh golongan Arab dibandingkan dengan golongan pribumi. Kedua, besar kemungkinan undangan yang diterima dalam bahasa Arab yang lebih dipahami dengan baik oleh golongan masyarakat Arab. Pun begitu, posisi umat Islam pribumi -dalam hal ini para elit pribumi Islam- jelas lebih berpengaruh. Hal ini dibuktikan dengan tetap disampaikannya undangan dan disertai dengan harapan untuk mengirimkan delegasi yang kemungkinan

⁴⁸ Muhammad Dhia'uddin Ar-Rais, *Islam dan Khilafah di Zaman Modern* (terj: Alwi), (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), h. 50-51.

⁴⁹ Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 122.

diharapkan juga berasal dari golongan pribumi. Disampaikannya undangan kepada elit muslim pribumi juga menandai adanya kemampuan konsolidasi umat yang dimiliki oleh elit pribumi, di samping dengan telah diselenggarakannya forum bersama dalam kongres al-Islam sebelumnya.

Dalam pertemuan tersebut terjadi diskusi yang panjang tentang khilafah dan pengiriman delegasi untuk kongres di Kairo. Tjokroaminoto dalam pidatonya menyampaikan tentang perlunya umat Islam memiliki seorang khalifah dan perlunya peran aktif umat Islam di Indonesia untuk kepentingan khilafah.⁵⁰ Semua sepakat pentingnya kongres di Kairo yang akan datang, tetapi beberapa orang mempermasalahkan biaya keberangkatan delegasi dari Hindia Belanda ke Kairo yang sangat tinggi. Muncul saran untuk hanya mengirimkan mandat yang ditulis atas nama umat Islam Hindia Belanda kepada kongres atau meminta mahasiswa Hindia Belanda di Kairo untuk mewakili. Bahkan, ada yang berpandangan bahwa pengiriman delegasi tidak akan berguna karena orang Arab akan menganggap delegasi Indonesia tidak lebih dari seekor lalat. Namun, keberatan-keberatan tersebut ditolak oleh sebagian besar peserta. H. Fakhruddin, seorang tokoh Muhammadiyah, memberi kepercayaan diri bagi umat Islam Hindia Belanda. H. Fakhruddin mengatakan, jika memang benar orang Mesir memandang rendah umat Islam Hindia Belanda sebagai lalat, maka biarkan mereka tahu seperti apa lalat ini. Dia menegaskan pula bahwa Islam tidak membuat perbedaan ras, orang (Islam) Hindia Belanda tidak kalah dari orang Mesir.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, 122-123.

⁵¹ *Ibid*, 123. Lihat pula, *Bandera Islam*, 30 Oktober 1924. Dalam catatan pemerintah kolonial, pertemuan ini tidak hanya membicarakan tentang undangan kongres dan khilafah, namun di atas itu yaitu

Pendapat Fakhruddin tersebut dikuatkan oleh pernyataan Tjokroaminoto bahwa belum pernah dalam sejarahnya diadakan sebuah kongres agama Islam sedunia, sehingga kongres ini akan menjadi yang pertama dan oleh karenanya hal ini menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam. Karena itu, dalam hal ini perlu dikirim utusan ke Kairo. Tjokroaminoto percaya bahwa ada banyak orang Hindia Belanda yang cakap menjadi utusan dan tidak akan dihina. Kemudian dia menegaskan bahwa sebagaimana yang diputuskan dalam kongres Centraal Sarekat Islam beberapa waktu yang lalu, Sarekat Islam akan membantu dengan sekuat-kuat tenaga dan pikiran.⁵²

Sosok H. Fakhruddin menjadi penting dalam pertemuan tersebut. Hal ini terlihat dari posisinya yang dianggap pemimpin yang bijaksana -dibandingkan sebagai politisi- dan kata-katanya beberapa kali menghangatkan diskusi. Sementara Tjokroaminoto dan lainnya ingin segera mengambil keputusan tentang delegasi Kairo, Fakhruddin mengusulkan agar mendirikan Komite Khilafah (*Comite Chilafat*) untuk merespon permasalahan khilafah dalam langkah-langkah teknis serta untuk mengurus urusan umat Islam lainnya secara global. Tampaknya Fakhruddin menginginkan umat Islam Hindia Belanda memiliki peran yang lebih aktif dalam masalah besar yang dihadapi dunia Islam, dan pada saat yang sama memperkuat ikatan komunitas umat Islam yang berada dimanapun.⁵³

menunjukkan Islam sebagai kekuatan politik serta rasa bangga sebagai umat Islam. Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia...*, h. 212-213.

⁵² *Bandera Islam*, 30 Oktober 1924.

⁵³ Dalam konteks ini, terdapat anggapan bahwa Fakhruddin dan Tjokroaminoto memiliki ide untuk mendirikan komite khilafah ini karena mengikuti pola yang sama yang berasal dari pergerakan Islam lain, terutama komite khilafah di India. Namun tidak diketahui secara pasti bagaimana cara Fakhruddin dan Tjokroaminoto mendapat informasi mengenai pergerakan khilafah di India. Informasi mengenai pergerakan khilafah di India sendiri baru mengemuka secara luas di bulan Agustus 1925. Yang menarik pula, dalam pertemuan ini Agus Salim -yang biasanya sangat *concern* dengan wacana Pan-Islam- ternyata tidak datang

Pertemuan tersebut juga membahas tentang konsep khilafah yang akan datang. Khalifah sejauh ini hanya mengurus urusan agama saja, sedangkan sebenarnya khalifah harus memiliki kekuasaan dalam urusan agama dan dunia. Segala keperluan khalifah merupakan kewajiban semua umat Islam dan dalam Al-qur'an disebutkan bahwa khalifah harus ada. Perlu diadakan Majelis Khilafah dengan dikepalai oleh seorang ketua, dan ketua tersebut yang dinamakan khalifah, sedangkan anggota majelis tersebut haruslah diambil dari wakil umat Islam di masing-masing negeri.⁵⁴

Sepanjang sejarah umat Islam Hindia Belanda, pertemuan ini menjadi pertemuan khusus membahas khilafah yang pertama kali diadakan di Hindia Belanda.⁵⁵ Hasil penting dari pertemuan ini adalah kesepakatan bahwa keberadaan khilafah adalah wajib, dan kesediaan mereka untuk menghadiri kongres di Kairo. Dalam pertemuan ini dihimbau agar saat shalat Jum'at, Imam Masjid menerangkan tentang kewajiban umat Islam untuk mengadakan serta mengangkat khalifah. Selain itu, disepakati pula mengenai pembentukan Komite Khilafah dengan beranggotakan umat Islam Hindia Belanda baik dari golongan tradisional maupun golongan pembaharu. Keputusan teknis lain dalam kaitannya dengan

menghadirinya. Lihat, Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 123.

⁵⁴ Dalam pertemuan ini dibahas pula tentang posisi Mustafa Kemal. Munculnya pembahasan ini karena adanya usulan dari beberapa umat Islam untuk menominasikan Mustafa Kemal sebagai khalifah yang baru. Tjokroaminoto kemudian menyetujuinya, serta beranggapan bahwa terlalu dini untuk menilai apakah Mustafa Kemal benar-benar akan menjalankan program sekularisasi di Turki. Fakhruddin kemudian menyelesaikan diskusi mengenai hal ini. Fakhruddin menegaskan supaya khalifah berkududukan di Mekah karena Mekah adalah negerinya orang Islam sedunia dan bebas dari intervensi non-muslim. Posisi khalifah tidaklah boleh berkedudukan di salah satu tempat, Turki atau Mesir misalnya. Jika kemudian posisi khalifah ada di tempat selain Mekah maka bisa jadi khalifah itu akan mementingkan keperluan bangsanya sendiri daripada bangsa lain meskipun sesama umat Islam. Oleh karena itu siapa saja yang dipilih menjadi khalifah harus bertempat tinggal di Mekah. Tentang siapa yang akan menjadi khalifah diputuskan untuk diselidiki bersama-sama dengan umat Islam yang lain saat di Kairo nanti. Lihat dalam, *Ibid*, h. 123. Lihat pula, *Bandera Islam*, 30 Oktober 1924.

⁵⁵ Hal ini dapat dilihat dalam reportase dari surat kabar yang juga dikelola Agus Salim yaitu, *Hindia Baroe*, 16, 17, 18 Oktober 1924.

Kongres Kairo seperti mengenai orang yang akan menjadi delegasi, mandat yang dibawa, serta biaya delegasi yang diperlukan, ditunda dan akan dibawa ke Kongres al-Islam Luar Biasa yang akan diselenggarakan segera oleh Komite Khilafah.⁵⁶

Komite Khilafah sendiri merupakan wadah bagi perjuangan dalam revitalisasi lembaga khilafah bagi umat Islam Hindia Belanda. Pembentukan Komite Khilafah kemudian berlangsung secara cepat dan menyebar dengan luas dan ditanggapi dengan sangat antusias oleh umat Islam di berbagai daerah.⁵⁷ Hal ini menandai bahwa umat Islam Hindia Belanda dalam merespon permasalahan khilafah telah sampai pada tataran teknis-praktis dan turut pula membuktikan bahwa masalah khilafah adalah masalah yang layak mendapat perhatian luar biasa.⁵⁸

Pembentukan Komite Khilafah menunjukkan bahwa aspek legal-formal-organisatoris dalam pelaksanaan suatu kongres telah dipahami dengan baik oleh umat Islam Hindia Belanda. Pembentukan Komite Khilafah menandai pula akan rapi dan teraturnya pelaksanaan kongres yang menunjukkan tingkat kematangan umat Islam Hindia Belanda dalam berorganisasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka saat itu telah berhasil merumuskan sebuah konsep (baru) dalam memperjuangkan lembaga khilafah serta menunjukkan keseriusan mereka terhadap upaya revitalisasi lembaga khilafah.

⁵⁶ *Bandera Islam*, 16 Oktober 1924. Lihat pula, Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 123-124.

⁵⁷ *Bandera Islam*, 11 Desember 1924 dan 15 Januari 1925.

⁵⁸ Wardini Akhmad, *Kongres Al-Islam 1922-1941 ...*, h. 168-169.

Pembentukan Komite Khilafah jika dibandingkan dengan usaha-usaha sebelumnya untuk menggalang persatuan Islam dapat dikatakan sebagai perumusan kembali wawasan kolektif umat dalam kehidupan politik Islam. Wawasan politik Islam ini menjadi lebih kongkrit setelah pers-pers Islam mulai meningkatkan propagandanya untuk menerangkan pentingnya kedudukan khilafah bagi Islam dan umat Islam. Dengan mempropagandakan arti penting khilafah tersebut, umat dirangsang untuk lebih tegas menyatakan sikapnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama Mesir, dinyatakan bahwa kepentingan khilafah adalah menjunjung tinggi dan mengangkat kekuasaan agama Islam beserta umatnya, maupun mempersatukan mempersatukan dan mengumpulkan tali-tali yang mengikat orang Islam bersama.⁵⁹

Pada perkembangan selanjutnya Komite Khilafah membentuk cabang-cabang sebagai wadah perjuangan di daerah. Komite Khilafah pusat (*Centraal Comite Chilafat*) memiliki susunan kepengurusan sebagai berikut.⁶⁰

1. *Ketua : Wondo Soedirjo (pimpinan dari SI lokal)*
2. *Wakil Ketua : K.H. Abdul Wahab (pimpinan dari lembaga Tasywirul Afkar)*
3. *Sekretaris : A.M. Sangadji dan S.B. Balimerti (anggota dari CSI)*
4. *Bendahara : Sech M. Aboed Alamoedi (bendahara al-Irsyad)*
5. *Anggota : Said Idroes Almasjhoer (editor dari majalah Arab), K. H. Mas Mansur (pimpinan Muhammadiyah Surabaya), H. Hassan Gipo, Mansoer Janani (guru di sekolah Arab), H. Noerscham, H. Abdullah Hakim, H. Abdulmannan, H. Brahim, Oerip Njamploengan, R. Achmad, H. Machsoedi, Saleh bin Achmad, Oemar Hoobis, dan H. Bahri.*

Kongres al-Islam ketiga (disebut juga Kongres al-Islam Luar Biasa) kemudian diselenggarakan pada tanggal 24-26 Desember 1924 di Surabaya

⁵⁹ *Bandera Islam*, 16 Oktober 1924.

⁶⁰ *Bandera Islam*, 30 Oktober 1924. Lihat pula, Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 123-124.

dengan agenda tunggal yaitu membicarakan masalah khilafah. Kongres ini dihadiri oleh para ulama dan 68 organisasi Islam yang mewakili pimpinan pusat maupun cabang.⁶¹ Ada tiga keputusan yang dihasilkan dari kongres ini. Pertama, wajib hukumnya terlibat dalam perjuangan khilafah. Kedua, disepakati akan terus didirikan cabang-cabang Komite Khilafah di seluruh Hindia Belanda.⁶² Dan terakhir, diputuskan akan mengirimkan tiga orang utusan sebagai wakil umat Islam Hindia Belanda ke Kongres Kairo dengan enam butir mandat yang telah disepakati. Tiga orang utusan tersebut adalah Surjopranoto dari Sarekat Islam, H. Fakhrudin dari Muhammadiyah dan K. H. A. Wahab Hasbullah dari kalangan tradisional.⁶³ Komite Khilafah yang kemudian bertugas menetapkan mandat yang akan dibawa oleh delegasi Hindia Belanda. Mandat tersebut berisi sebuah konsep khilafah yang akan ditegakkan.

Kongres juga membahas masalah biaya yang dibutuhkan. Sebuah komite yang sudah mati pergerakannya, *Tentara Kandjeng Nabi Muhammad* (TKNM),⁶⁴

⁶¹ Diperkirakan sekitar 600 orang dari seluruh Jawa menghadiri kongres ini. Terdapat pula delegasi kecil dari Kalimantan (bagian) Tenggara sebagai satu-satunya utusan yang datang dari luar pulau Jawa. *Ibid*, 124.

⁶² Komite cabang yang pernah didirikan antara lain adalah Komite Khilafah Yogyakarta, Komite Khilafah Pekalongan, Komite Khilafah Cirebon, Komite Khilafah Pasuruan, Komite Khilafah Bogor, Komite Khilafah Banjarmasin dan Komite Khilafah Cianjur. *Bandera Islam*, 11 Desember 1924. Dalam soal ini pula, tidak diketahui dengan pasti tentang apakah konsep komite khilafah yang dibentuk di Hindia Belanda merujuk pada konsep komite khilafah di tempat lain semisal komite khilafah di India. *Ibid*, 124-125.

⁶³ *Bandera Islam*, 1 Januari 1925. Sebelum keluar nama ketiga delegasi yang bersangkutan, salah satu sub Komite Khilafah di Jakarta juga memiliki usulan nama-nama orang yang akan menjadi delegasi seperti antara lain, 1. M. Sajuty Loebies di Samarinda (Borneo), 2. K. Hadji Mas Mansoer *Adviser* C. Sarekat Islam Surabaya, 3. O.S. Tjokroaminoto pemimpin pertama kongres al-Islam Hindia, 4. K. Hadji A. Salim pemimpin kedua Kongres al-Islam Hindia, 5. R. M. Soerjopranoto *Commissaris* C. Sarekat Islam Jogjakarta. *Bandera Islam*, 11 Desember 1924. Keputusan kongres al-Islam luar biasa ini, seperti keputusan pengiriman delegasi juga memicu respon dari pihak-pihak yang bahkan tidak terlibat didalamnya. Budi Utomo lewat surat kabarnya *Sedio Tomo* mempermasalahkan keputusan pengiriman delegasi ke Kairo. *Sedio Tomo* keberatan dengan penunjukan Surjopranoto dan H. Fakhrudin sebagai delegasi karena keduanya tidak memiliki keahlian untuk menjadi delegasi. Kritik *Sedio Tomo* tidak berakhir sampai situ. Surat Kabar ini kemudian mempermasalahkan kembali tentang pengiriman delegasi ini. Kali ini *Sedio Tomo* berdalih jika Soerjopranoto berangkat ke Kairo maka organisasi-organisasi yang dia pimpinnya akan terlantar, namun tuduhan ini jelas dibantah oleh Soerjopranoto. Lihat, *Bandera Islam*, 15 Januari 1925.

⁶⁴ TKNM dibentuk Central Sarekat Islam (CSI) di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto bersama dengan Bupati Surabaya berdarah Arab, Hasan bin Smit, pada pertemuan rapat 6 Februari 1918 di Surabaya.

yang beberapa tahun sebelumnya telah menerima banyak dukungan dari Orang Arab kaya, menyerahkan sisa dananya sebesar 3100 gulden kepada Komite Khilafah. Tambahan dana lagi dari al-Irsyad sebesar 500 gulden. Tambahan dana lainnya berasal pula dari peserta kongres yang kurang lebih terkumpul sebesar 444 gulden. Hasil lain dari kongres adalah mandat yang akan dibawa delegasi ke Kairo. Mandat yang disiapkan oleh Komite Khilafah ini, setelah beberapa diskusi, diadopsi oleh kongres tanpa perubahan signifikan. Dalam mandat tertera usulan untuk memodernisasikan khilafah, representatif, dan terpilih. Poin utama dari mandat tersebut sebagai berikut:⁶⁵

1. *Agar dibentuk suatu Majelis Khilafah yang melaksanakan kekuasaan dan kewajiban khalifah atas dasar hukum-hukum Qur'an dan Hadits.*
2. *Kepala Majelis mengatur, menjaga, dan mengupayakan terlaksananya keputusan-keputusan Majelis.*
3. *Kepala Majelis dipilih oleh Majelis berdasarkan Syari'ah yang disetujui atasnya dalam permusyawaratan khilafah kemudian pemilihan tersebut diumumkan agar mendapat pengakuan dari seluruh umat Islam di dunia.*
4. *Majelis Khilafah mengupayakan persamaan paham dan peraturan bagi segala perkara hukum Islam.*
5. *Majelis Khilafah hendaklah berada di Mekah.*
6. *Tentang biaya untuk Majelis Khilafah bersama-sama perlu ditemukan kesepakatan dengan umat Islam yang lain atas hal ini.*

Kongres al-Islam luar biasa ini ternyata mampu menarik minat umat Islam Hindia Belanda di beberapa daerah yang bukan termasuk kota basis pergerakan. Mereka tergabung dalam sub Komite Khilafah di berbagai daerah yang telah

TKNM muncul sebagai respon artikel di harian *Djawi Hisworo* yang berjudul "*Gusti Kandjeng Nabi Rasoel Minoem A.V.H. Gin dan Kadang Soeka Mengisap Opioem*". TKNM memiliki tiga tujuan yang dipengaruhi semangat Pan-Islam, yakni memajukan Islam di Hindia, memajukan persatuan sesama Muslim, dan melindungi kehormatan Islam, Nabi Muhammad, dan kaum Muslim. Awalnya TKNM dengan cepat menarik keterlibatan kaum Arab Hadhrami, baik pemikiran, tenaga dan yang terpenting adalah pendanaan. Namun diakhir, TKNM juga tidak diseriisi geraknya oleh para pengurusnya. Dalam konteks yang lain TKNM juga menandai polarisasi yang semakin antara identitas Islam (di Jawa)/santri *versus* Jawa (yang Islam)/abangan. Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*, h. 114-115.

⁶⁵ Lihat, *Bandera Islam*, 1 Januari 1925. Ejaan dalam kutipan ini telah disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan (EYD).

terbentuk sebelumnya. Pada 30 November 1924, umat Islam Cianjur mengadakan sebuah rapat besar yang dihadiri oleh sekitar 3.000 orang untuk membahas persoalan khilafah.⁶⁶ Hal yang sangat luar biasa, dalam konteks hari ini sekalipun, di kota Cianjur sebuah pertemuan yang membicarakan khilafah dapat dihadiri peserta sebanyak 3.000 orang. Dalam laporan Kongres al-Islam luar biasa, Sub-komite Khilafah Cianjur memang tercatat hadir sebagai peserta kongres. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perjuangan khilafah yang ada di daerah memiliki kaitan dengan perjuangan khilafah di pusat. Perjuangan khilafah di daerah bahkan ikut menyiapkan calon delegasi yang akan dikirim ke Kairo.

Bahkan, pasca Kongres al-Islam luar biasa tersebut telah membawa pengaruh yang besar bagi umat Islam Hindia Belanda. Di beberapa tempat hasil putusan kongres ini menjadi pembahasan dalam pertemuan-pertemuan. Kongres ini turut dihadiri oleh perwakilan dari daerah. Sekembalinya mereka ke daerah masing-masing mereka mengadakan pertemuan untuk menyampaikan hasil keputusan kongres, seperti Sarekat Islam Majalengka dan Sub-Komite Khilafah Cirebon yang mengadakan rapat untuk membahas hasil keputusan kongres tersebut. Rapat pasca kongres dilangsungkan di Majalengka yang dihadiri oleh 350 orang. Rapat ini mengagendakan pemberitahuan mengenai keputusan Kongres al-Islam luar biasa.⁶⁷

Hal serupa juga terjadi di Cirebon. Pada tanggal 25 Januari 1925 telah diadakan rapat terbuka oleh sub Komite Khilafah Cirebon untuk menyampaikan putusan kongres al-Islam luar biasa. Rapat ini mendapatkan respon yang baik dari

⁶⁶ *Bandera Islam*, 11 Desember 1924.

⁶⁷ *Bandera Islam*, 15 Januari 1925.

masyarakat luas. Acara yang bertempat di Bioskop Pagongan ini dihadiri oleh 100 orang beserta perwakilan dari berbagai organisasi. Bahkan, acara ini dihadiri oleh aparaturnegara seperti wakil pemerintah wedana, asisten wedana dan polisi di Cirebon.⁶⁸ Hal ini menunjukkan bahwasanya mereka yang di daerah pada dasarnya juga merasa berkewajiban untuk memperbincangkan dan mencari penyelesaian urusan khilafah ini dan membuktikan bahwa persoalan khilafah bukanlah menjadi urusan yang hanya diurus di tingkat pusat semata namun juga daerah. Oleh karena itu, perjuangan khilafah mendapatkan antusiasme umat Islam di berbagai tempat di Hindia Belanda. Antara perjuangan Komite Khilafah di pusat (Surabaya) dan di daerah, keduanya bersinergis menuju tujuan yang sama.

Di tingkat pusat, Sarekat Islam sendiri pasca Kongres al-Islam ketiga juga melancarkan propaganda-propagandanya atas upaya persatuan ini dalam media massa yang berafiliasi dengan mereka. Yang menarik pula, Sarekat Islam juga mengiklankan foto-foto persidangan kongres tersebut dengan tujuan untuk dijual kepada khalayak luas. Foto ini terdiri dua macam. Yang pertama foto para pemimpin kongres beserta utusan berbagai organisasi dan yang kedua foto utusan dengan masyarakat. Masing-masing foto dihargai f. 2.50 ditambah ongkos kirim sebesar f. 0.50. Dengan kalimat persuasif foto-foto ini diiklankan sebagai sesuatu yang penting sekali dan sebagai bukti bahwa umat Islam Hindia Belanda telah membicarakan satu persoalan internasional yang terbesar yaitu persoalan khilafah. Kalimat persuasif itu dilanjutkan dengan ajakan untuk membeli foto-foto tersebut dalam rangka menolong upaya revitalisasi khilafah.⁶⁹ Pendek kata, isu khilafah

⁶⁸ *Bandera Islam*, 5 Februari 1925.

⁶⁹ *Bandera Islam*, 29 Januari 1925.

pada saat itu adalah isu penting yang mampu menarik animo umat Islam Hindia Belanda sedemikian luas dari beragam golongan, kepentingan, maupun wilayah.

Pada awal Januari 1925, Tjokroaminoto mengirimkan telegram ke Kairo yang berisikan reportase dan keputusan kongres al-Islam ketiga serta pertanyaan tentang kepastian tempat dan tanggal kongres di Kairo. Setelah beberapa lama tidak ada balasan dari telegram ini sehingga menimbulkan prasangka bahwa ada kendala di Kairo yang menyebabkan kongres akan diundur. Prasangka tersebut ternyata tepat. Sekitar pertengahan bulan Januari beberapa surat kabar Belanda di Hindia Belanda memberitakan bahwa kongres di Kairo diundur satu tahun kedepan. Faktor perkembangan sosial politik di tanah Hijaz nantinya juga menambah belum jelasnya pelaksanaan kongres di Kairo. Hal ini ditambah pula dengan belum jelasnya beberapa negeri Islam tentang seluk-beluk kongres, juga karena kesibukan Mesir dalam menghadapi pemilu sehingga menjadikan pelaksanaan kongres Kairo ditunda paling tidak dalam waktu satu tahun kedepan.⁷⁰

Dengan diundurnya pelaksanaan kongres di Kairo, muncul pula berita bahwa di semenanjung Arab (Hijaz) terjadi pertempuran dan perebutan kekuasaan antara Abd al-Aziz ibn Sa'ud melawan Syarif Husain. Pada bulan Oktober 1924, Abd al-Aziz ibn Sa'ud, menyerbu Mekah hingga akhirnya seluruh Hijaz, termasuk Jeddah berada di tangan Ibn Sa'ud dan di lain pihak Syarif Husain sudah tidak mendapatkan kekuasaan lagi. Kemenangan Ibn Sa'ud dan rencananya untuk

⁷⁰ *Bandera Islam*, 22 Januari 1925.

menyelenggarakan pertemuan Mekah menimbulkan polarisasi orientasi baru Islam di Hindia Belanda, khususnya Jawa.⁷¹

Dinamika politik di Hijaz ini menjadi isu yang mendapat perhatian serius. Hal ini terutama sekali menyangkut keamanan ibadah haji yang setiap tahun dilaksanakan. Permasalahan Hijaz ini juga menyadarkan umat Islam Hindia Belanda akan keterbutuhan mereka dengan sosok seorang khalifah yang menjadi pemersatu mereka. Setelah menguasai Mekah, Ibnu Sa'ud kemudian mengumumkan niatnya untuk menyelenggarakan Kongres Dunia Muslim di Mekah. Dengan begitu, maka baik Mekah maupun Kairo sama-sama berebut kedudukan khilafah.⁷² Pada perkembangan selanjutnya, Kongres al-Islam yang diadakan setelahnya menjadi lebih condong kepada kongres (Islam) yang akan diadakan di Mekah.⁷³

Kecondongan pada kongres yang akan dilaksanakan di Mekah dapat pula dikaitkan dengan posisi Mekah yang secara tradisional dipahami umat Islam Hindia Belanda sebagai tempat pelaksanaan ibadah haji sehingga posisinya

⁷¹ Terutama sekali dari kalangan tradisionalis khususnya di Jawa Timur yang menganggap kemenangan itu akan membawa dampak perubahan tradisi keagamaan menurut ajaran mazhab, sebab Ibnu Sa'ud dikenal beraliran Wahabi. Ibnu Sa'ud sendiri dikenal dengan semboyannya "Kembali kepada Qur'an dan Hadits dengan mengikis habis segala sesuatu yang berbau syirik". Paham ini memulai gerakannya dengan kampanye besar-besaran membongkar kultus bagi orang-orang suci, bangunan-bangunan makam dan apa saja yang dianggap keramat oleh pemuja. Sampai makam nabi dan empat sahabat (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali) yang ada disekitar Ka'bah pun akan dimusnahkan. Melihat fakta ini maka muncul kecemasan di kalangan Islam tradisional. Kecemasan terbesar kalangan tradisional yang diwakili melalui pihak pesantren adalah terjadinya larangan tradisi keagamaan berdasarkan ajaran mazhab Ahlussunnah Waljamaah dan perbaikan tata laksana ibadah haji khususnya tradisi tarekat sufi dan wirid, pembacaan shalawat nabi dan pengajaran kitab-kitab mazhab. Setelah kemenangan itu, pemimpin Wahabi ini mulai melakukan pembersihan dalam kebiasaan praktek agama sesuai dengan ajarannya. Namun begitu, ia tidak melarang pelajaran mazhab di Masjid al-Haram. Sebagian tindakan ini mendapat sambutan baik di Hindia Belanda tetapi sebagian lainnya juga ditolak. Lihat, Martin Van Bruineesen, *NU: Tradisi Relasi-Relasi Kuasa, Pecarian Relasi-Relasi Baru* (terj: Farid Wajidi), (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 29-30.

⁷² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 243.

⁷³ Namun, munculnya rivalitas antara pelaksanaan kongres Kairo dan Mekah -terutama ketika muncul undangan menghadiri kongres di Mekah- ini menandai pula akan semakin meruncingnya friksi diantara kaum pembaharu dan tradisionalis, dimana kaum tradisionalis kemudian memberikan cap "kaum wahabi" kepada golongan pembaharu yang baru selesai melaksanakan haji (kembali dari Hijaz). Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia...*, h. 225.

menjadi lebih utama jika dibandingkan dengan Kairo. Haji menjadi faktor penting pemersatu baik secara tradisi maupun secara politis. Selain itu, dukungan politik riil dari Ibn Sa'ud menjadi garansi akan penegasan pentingnya pelaksanaan kongres di Mekah ini.

Undangan dari Ibnu Sa'ud diterima pula oleh umat Islam Hindia Belanda. Kecondongan terhadap kongres yang akan dilaksanakan di Mekah memunculkan wacana dan menjadi topik pembicaraan dalam Kongres al-Islam keempat di Yogyakarta dan Kongres al-Islam kelima di Bandung. Dalam pelaksanaan kedua Kongres al-Islam ini muncul kesepakatan untuk menghadiri -dan lebih mengutamakan- kongres di Mekah. Kedua kongres ini pada pelaksanaan juga lebih didominasi oleh golongan pembaharu Islam. Bahkan, sebelum kongres di Bandung, organisasi-organisasi pembaharu mengadakan pertemuan di Cianjur pada Januari 1926. Dalam pertemuan di Cianjur ini bahkan telah diputuskan untuk mengirim Tjokroaminoto dari Sarekat Islam dan K.H. Mas Mansur dari Muhammadiyah ke Mekah untuk mengikuti kongres.⁷⁴

Sementara itu, dinamika di Turki -pasca program sekularisasi yang dicanangkan Mustafa Kemal berlangsung- masih juga diikuti oleh umat Islam Hindia Belanda. Semisal tentang pemberontakan di Turki yang dipimpin oleh Syekh Said.⁷⁵ Pemberontakan ini dipandang oleh umat Islam Hindia Belanda,

⁷⁴ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 243.

⁷⁵ Sepanjang tahun 1924, berbagai macam undang-undang disahkan menandai perjalanan Turki semakin mengarah kepada negara sekuler. Undang-undang tersebut semakin menghilangkan pengaruh dan struktur lembaga-lembaga Islam dari rakyat dan negara. Hal ini mengundang keresahan di kalangan masyarakat khususnya suku-suku Kurdi yang berada di Turki timur. Keresahan ini mengundang kemarahan dari suku-suku di timur hingga akhirnya para kepala suku merencanakan untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Beberapa orang meminta dukungan dari Said Nursi untuk melakukan pemberontakan dan memerdekakan diri dari pemerintahan sekuler Turki, namun Nursi menolaknya. Ia melakukan segala cara untuk meyakinkan para kepala suku agar tidak melakukan pemberontakan dan menjaga nyawa para penduduk agar tidak terbuang karena ini. Sebagian mendengarkan nasehatnya dan sebagian lain tidak. Maka pecahlah

muncul karena dilatarbelakangi upaya untuk menegakan kembali khilafah di Turki.⁷⁶ Pemberontakan ini nampaknya dibaca oleh umat Islam Hindia Belanda sebagai perjuangan untuk mendapatkan kebaikan di tengah kondisi Turki yang semakin tersekulerkan oleh rezim Mustafa Kemal dimana pemerintahan Turki sendiri telah kehilangan banyak dukungan dari dunia Islam. Respon yang ditunjukkan selanjutnya yaitu mengecam dan meminta agar (pendukung) Mustafa Kemal sadar akan kekeliruannya.⁷⁷

Selanjutnya, Kongres al-Islam keempat dilangsungkan di Yogyakarta. Kongres al-Islam keempat ini diadakan secara bersamaan dengan kongres nasional Sarekat Islam kedua belas. Kongres ini dilaksanakan pada 20-27 Agustus 1925. Pertentangan antara kaum pembaharu dan tradisionalis yang ada pada Kongres al-Islam Luar Biasa muncul kepermukaan pada kongres ini. Salah satu poin dalam agenda Kongres al-Islam keempat ini adalah program kalangan pembaharu tentang *tanzim*, yaitu reformasi sosial, ekonomi, dan kebudayaan sesuai dengan prinsip Islam. Prinsip-prinsip itu sendiri adalah soal pertentangan yang kuat antara golongan pembaharu dengan tradisional. Namun karena adanya protes dari beberapa kalangan tradisional, persoalan ini ditangguhkan. Dalam pertemuan ini golongan tradisional menunjukkan sikap defensifnya. Sikap defensif golongan tradisional dalam kongres ini diperkuat oleh sikap antusias H. Agus Salim kepada Ibnu Sa'ud. Para pemimpin Sarekat Islam berbicara panjang

pemberontakan pada 13 Februari 1925 di bawah pimpinan Syekh Said, seorang pemimpin tarekat Naqsyabandiyah. Pemberontakan itu berhasil ditumpas dalam waktu dua bulan. Kelak, pemberontakan inilah yang kemudian dijadikan alasan oleh pemerintah untuk membuat undang-undang yang semakin menekan kaum muslim. Ulasan ringkas dapat lihat, Sukran Vahide, *Biografi Intelektual Bediuzzaman Said Nursi* (terj: Sugeng Haryanto), (Jakarta: Anatolia, 2007), h. 288.

⁷⁶ *Bandera Islam*, 12 Maret 1925.

⁷⁷ *Bandera Islam*, 2 April 1925.

lebar tentang keuntungan prajurit *Najdi* untuk dunia Islam dan menyebutkan perang yang masih berlangsung di Hijaz adalah sebuah perjuangan antara yang mulia Ibnu Sa'ud dan yang hina Syarif Husain. Golongan tradisional di kongres bisa jadi memiliki pandangan yang sama tentang politik keluarga Syarif Husein, tetapi mereka lebih sedikit cemas dengan tujuan Ibnu Sa'ud.⁷⁸

Melihat situasi ini, K.H. Abdul Wahhab, juru bicara golongan tradisional, mengusulkan kepada kongres untuk mengirim delegasinya ke Mekah setelah Kongres Kairo untuk menjumpai Ibnu Sa'ud supaya memberi toleransi mazhab dan pelaksanaan praktik-praktik tradisional. Atas usulannya tersebut, K.H. Abdul Wahhab mendapatkan respon yang membuatnya kecewa. Banyak kalangan pembaharu segan datang untuk membela praktik keagamaan yang mereka sendiri menentang. Oleh sebab itu, golongan tradisional merasa Kongres al-Islam sudah tidak memiliki kegunaannya lagi untuk mereka dan hal ini menjadi dorongan bagi kalangan tradisional untuk mengorganisir diri dalam organisasi yang terpisah dari golongan pembaharu.⁷⁹ Peristiwa ini pula yang menandai mulai terpecahnya umat Islam Hindia Belanda secara terbuka.

Buntutnya, pada pelaksanaan Kongres al-Islam kelima yang diselenggarakan oleh Komite Khilafah di Bandung pada Februari 1926, tidak dihadiri oleh golongan tradisional yang telah terorganisir dalam NU dan begitu pula dalam kongres-kongres selanjutnya yang sudah tidak terdapat lagi delegasi dari golongan tradisional. Pun begitu, antusiasme golongan pembaharu kepada

⁷⁸ Golongan tradisional telah menerima laporan bahwa pasukan Ibnu Sa'ud telah menghancurkan makam-makam suci, dan melarang pembacaan puji-pujian (doa) banyak dilakukan kaum tradisional, seperti (bacaan) *Jazuli Dala'il al-Khairat*. Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 125-126.

⁷⁹ Dalam kaitannya dengan kepentingan golongan tradisional, mereka baru dapat berangkat dua tahun kemudian, dan berangkat tanpa membawa nama kongres al-Islam. *Ibid*, 126.

Ibnu Sa'ud pada kongres ini tidak berkurang, walau kemudian Ibnu Sa'ud memproklamkan dirinya sebagai raja dan bukan khalifah.

Pada pelaksanaan Kongres al-Islam kelima ini dihadiri oleh utusan perserikatan Islam yang berjumlah 234 dari keseluruhan suara yang berjumlah 255 organisasi, 21 organisasi dengan pengiriman kawat telegram yang berasal dari Jawa, Borneo (Kalimantan) dan Selebes (Sulawesi). Pihak pers yang meliput kegiatan ini berasal dari *Soera Perdamaian*, *Sri Djojobojo*, *Bendera Islam*, *Ind. Telegraaf*, *Kaoem Moeda*, *Pait*, *Zaman Baroe*, *Preanger Bode*, *Al-Achkaf*, *Hindia Baroe*, *Alpena*, *Si Petahoenan*, *Het Licht*, *Sin Bin*, dan *Bintang Islam*. Utusan dari pihak Pemerintah Hindia Belanda diwakili oleh pejabat Kantor Urusan Pribumi (*Kantoor voor Inlandsche Zaken*), Komisarisi Polisi dan bawahannya. Massa yang menghadirinya kira-kira 1500 orang pada hari pertama kongres dan 2500 orang di hari kedua.⁸⁰

Kongres kembali menegaskan mengenai delegasi yang terdiri dari Tjokroaminoto dan K.H. Mas Mansur yang akan menghadiri setidaknya kongres Mekah dan mungkin juga kongres Kairo. Namun, Tjokroaminoto mengatakan rumor mengenai intrik-intrik bahwa dalam kongres Kairo, Raja Fuad dari Mesir telah dipilih sebagai khalifah. Dia tidak ingin mendukung Raja Fuad yang dinilainya sebagai antek asing. Pada akhirnya delegasi hanya mengambil bagian dalam Kongres Mekah.⁸¹

⁸⁰ *Hindia Baroe*, 12 Februari 1926.

⁸¹ Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 126-127. Dinamika kongres Kairo dan kongres Mekah diulas lengkap dalam, Martin Kramer, *Islam Assembled: The Advent of The Muslim Congresses*, h. 86-122.

Meskipun demikian, kongres Kairo masih juga dihadiri oleh dua orang dari Hindia Belanda. Mereka adalah tokoh golongan pembaharu dari Sumatera Barat, yakni Syaikh Abdullah Ahmad dan Syaikh Abdul Karim Amrullah atau dikenal pula dengan Haji Rasul.⁸² Kongres yang dilaksanakan pada 13-19 Mei 1926 di Kairo ini mengakui betapa penting artinya khilafah bagi umat Islam untuk mengagungkan kalimat Allah dan mempertahankan kebesaran Islam. Namun diakui pula bahwa khilafah dalam arti sebenarnya hanya terjadi pada zaman klasik, ketika seluruh daerah bisa diikat dalam satu perintah dan satu organisasi. Kondisi saat ini telah berubah sedemikian rupa sehingga kongres berpendapat hampir mustahil menegakan tahta khilafah, dan memberikan saran sebaiknya melepaskan gagasan ini.⁸³ Hingga kongres selesai, tidak ada satupun keputusan yang dihasilkan. Kongres akhirnya dibubarkan dan persoalan khilafah ditutup.⁸⁴

Kongres Mekah sendiri diadakan pada 1 Juni 1926. Kedua delegasi⁸⁵ Kongres al-Islam bertolak ke Mekah dari Pelabuhan Tanjung Perak pada tanggal

⁸² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 242. Kedatangan mereka berdua dalam kongres Kairo dikarenakan undangan kongres datang (langsung) dari Rashid Ridha. Hal ini penting mengingat pengaruh Rashid Ridha yang besar terhadap golongan pembaharu di Sumatera Barat, walaupun ketika kongres berlangsung Rashid Ridha sudah tidak lagi terlibat. Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 127

⁸³ Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 87.

⁸⁴ Muhammad Dhia'uddin Ar-Rais, *Islam dan Khilafah di Zaman Modern*, h. 120-121. Dalam kaitannya dengan delegasi Hindia Belanda yang datang, Haji Rasul dalam kongres Kairo bahkan ingin mendapat penegasan dari peserta kongres yang lain, terutama dari para syaikh al-Azhar mengenai apakah kongres Kairo benar-benar akan menyelesaikan krisis mengenai kekhilafahan atau tidak. Dalam hal ini, para syaikh al-Azhar lebih banyak berbicara dalam aspek yuridis dan bukan aspek praktis. Dampaknya kemudian, Haji Rasul beranggapan bahwa golongan tradisional di Hindia Belanda yang paling konservatif sekalipun ternyata berpikiran lebih maju dibandingkan dengan para syaikh al-Azhar. Michael Francis Laffan, *Islamic Nationhood and Colonial Indonesia...*, h. 213-214. Dinamika ini diulas dalam Hamka, *Ajalku Riwayat Hidup Dr. H. Abd. Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*, (Jakarta: Djajamurni, tt), h. 137-146.

⁸⁵ Selain Tjokroaminoto dan Mas Mansur, terdapat pula empat orang Hindia Belanda lain yang turut hadir dalam kongres Mekah. Dua dari mereka adalah pribumi yang tinggal di Mekah. Adalah 'Alim Muhammad Baqir (berasal dari Yogyakarta) yang masuk dalam golongan tradisional, dan Jenan Tayyib (berasal dari Sumatera Barat) yang memimpin sebuah sekolah Hindia Belanda di Mekah yang masuk dalam golongan pembaharu. Dua orang yang lain adalah Umar Naji dan Muhammad bin Thalib yang mewakili organisasi al-Irsyad. Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 127.

2 Maret 1926 menggunakan kapal *Rondo*. Keberangkatan mereka dilepas dengan ramai oleh masyarakat di Surabaya. Demikian juga saat kapal mereka singgah di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Banyak pemimpin Islam di Jakarta yang merasa perlu datang ke pelabuhan. Begitu juga R. A. Kern serta beberapa pegawai *Kantoor voor Inlandsche zaken* juga datang ke sana untuk menemui mereka. R. A. Kern bahkan menyarankan agar mereka tidak ragu meminta bantuan kepada Konsul Belanda di Jeddah.⁸⁶ Kehadiran pejabat pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam permasalahan khilafah menarik untuk ditelusuri mengingat isu khilafah merupakan isu politik (Islam) yang pasti ditentang oleh pemerintah Kolonial. Kehadiran pejabat kolonial nampaknya dapat dipahami sebagai upaya pencitraan yang besar kemungkinan dilakukan dengan pertimbangan politik yang matang.

Pada kongres Mekah ini, delegasi dari Hindia Belanda tidak memberi kesan apapun bagi peserta kongres yang lain dan bahkan tidak (pernah) angkat bicara. Bahkan Tjoroaminoto yang dikenal sebagai orator ulung ternyata tidak paham bahasa Arab.⁸⁷ Ternyata, kongres Mekah tidak pula menyinggung persoalan politik -dalam hal ini soal khilafah- dengan tujuan untuk menghindari timbulnya masalah.⁸⁸ Tjokroaminoto lewat telegram yang dikirim dari Mekah menyatakan bahwa kongres yang diikutinya itu berusaha meningkatkan derajat

⁸⁶ *Bandera Islam*, 6 Mei 1926.

⁸⁷ Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 127. Kesan ini dikuatkan dengan pernyataan peserta kongres yang berasal dari Mesir. Ia menyatakan “orang-orang *Jawi/Jawa* adalah orang-orang yang lemah dalam setiap masalah. Mereka seperti terengah-engah, orang yang tenggelam yang berharap untuk menemukan sesuatu untuk dapat menolong mereka, dan mereka tidak mampu menggerakkan tangan atau lidah mereka. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menghindari komitmen apapun”. Lihat, Martin Kramer, *Islam Assembled: The Advent of The Muslim Congresses*, h. 109-110.

⁸⁸ Panitia Peringatan Seratus Tahun Haji Agus Salim, *Seratus Tahun Haji Agus Salim*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 15.

umat Islam. Kongres juga membuat rumusan tata-tertib untuk kongres berikutnya.⁸⁹ Oleh karenanya, kongres Mekah ini dapat pula dikatakan gagal dalam menuntaskan persoalan khilafah.

Pasca kembalinya delegasi ke Hindia Belanda, mereka disambut dengan Kongres al-Islam keenam pada 23 September 1926 di Surabaya. Dalam kongres ini mereka menyampaikan laporan perjalanan mereka selama mengikuti kongres di Mekah. Diputuskan pula dalam kongres ini untuk menggabungkan Kongres Al-Islam dengan Kongres Islam Sedunia di Mekah sehingga menjadi cabang Hindia Timur. Nama Kongres al-Islam kemudian diubah menjadi MAIHS (*Mu'tamar al-'Alam al-Islami far' al-Hindiyya al-Syarqiyyah*), atau Kongres al-Islam Sedunia cabang Hindia Timur.⁹⁰

Hingga pada tahun 1927 berlangsung kongres kedua Mekah, di mana dari Hindia Belanda dihadiri oleh H. Agus Salim. Kongres ini sendiri tidak juga berusaha menuntaskan masalah khilafah. Menurut H. Agus Salim, Ibnu Sa'ud tidak menginginkan masalah ini dibicarakan dalam kongres.⁹¹ Kongres al-Islam kedua di Mekah tahun 1927 dapat dikatakan sebagai suatu kegagalan. Agus Salim sendiri tiba terlambat, yaitu saat waktu haji habis dan delegasi dari negeri-negeri lain pulang. Delegasi dari negeri-negeri lain juga tidak memperoleh suatu hal yang positif, selain itu tidak ada keputusan apakah organisasi yang didirikan pada kongres selanjutnya dilanjutkan atau tidak. Untuk menghindari kegagalan total, Agus Salim mendekati beberapa tokoh di Saudi Arabia, termasuk Ibnu Sa'ud

⁸⁹ Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 88.

⁹⁰ Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 127. Kongres al-Islam keenam ini juga menetapkan Agus Salim sebagai pimpinan MAIHS dengan kesekretariatan bertempat di Surabaya. Panitia Peringatan Seratus Tahun Haji Agus Salim, *Seratus Tahun Haji Agus Salim*, h. 15.

⁹¹ Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 89.

sendiri, serta beberapa orang yang masih tinggal di Tanah Suci selesai ibadah haji. Sebagai hasil pendekatan ini berdirilah suatu organisasi yang bernama *Jami'at al-Ansar al-Haramain*, Perkumpulan Pelindung Kedua Tempat Suci (*Haramain*), yaitu Mekah dan Madinah. Sarekat Islam dipercaya untuk menyusun program kerja dan usaha penyebaran organisasi ini ke seluruh dunia.⁹² Bagaimanapun juga penyerahan organisasi tersebut kepada Sarekat Islam menjadi pertanda bahwa organisasi tersebut tidak serius dibentuk. Beberapa waktu kemudian organisasi ini segera mati dan tidak terdengar lagi. Melihat namanya, organisasi ini tidak ada kaitannya dengan persoalan khilafah yang kemudian menghilang.

Begitulah, respon umat Islam Hindia Belanda terhimpun dalam pelaksanaan kongres al-Islam dan pembentukan komite khilafah. Dalam perkembangan dinamika kongres pula, terhimpun beragam pandangan/sikap atas permasalahan keruntuhan Turki Utsmani/khilafah. Respon fundamentalis kemudian sangat terlihat, terutama ketika kongres al-Islam ketiga di Surabaya, dimana umat Islam Hindia Belanda menganggap bahwa khilafah adalah sesuatu yang penting untuk direvitalisasi. Di titik ini, penyelenggaraan kongres sejatinya juga menunjukkan bahwa persoalan khilafah menjadi persoalan yang penting untuk direspon, baik secara teologis dan terutama secara politis walau tujuan revitalisasi khilafah dapat dikatakan gagal untuk diwujudkan.⁹³

⁹² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 153.

⁹³ Keberadaan Komite Khilafah dan Kongres al-Islam masih dipertahankan dan bahkan dipermanenkan paling tidak hingga tahun 1931-1932. Tujuannya masih tetap mempromosikan wacana Pan-Islam melalui penerbitan media massa di tingkat lokal. Selain itu, tujuan lainnya adalah menjalin kerjasama dengan organisasi Islam lainnya serta untuk meredakan ketegangan dengan golongan nasionalis sekuler. Dalam penyelenggaraannya di tahun 1931 hingga 1932, kongres masih tidak berhasil mencapai tujuannya dalam membentuk satu kesatuan umat. Namun begitu momentum kongres ini dapat mengumpulkan kembali umat Islam Hindia Belanda dalam satu wadah baru yang diberi nama Pergerakan al-Islam Indonesia yang jumlah anggotanya mencapai 4.000 orang. Namun yang perlu dipahami pula, keberadaan komite dan kongres ini tidaklah sama seperti di awal pembentukannya. Komite dan Kongres al-Islam ini telah lebih akomodatif

E. Penerbitan Media Massa

Respon lain yang dilakukan umat Islam Hindia Belanda selain pengadaan kongres atau pertemuan adalah penerbitan media massa (dunia pers)⁹⁴ yang dalam hal ini adalah penerbitan surat kabar. Penerbitan media massa menjadi hal yang (biasanya) sepaket dengan pelaksanaan kongres/pertemuan. Pada masa itu, usaha penerbitan surat kabar merupakan cara yang biasa dilakukan oleh organisasi-organisasi pergerakan (Islam). Antara organisasi pergerakan dengan surat kabar diibaratkan sebagai kembar siam. Keduanya hidup berdampingan secara simbiotik. Surat kabar merupakan cara yang efektif bagi organisasi pergerakan untuk menyosialisasikan maksud pergerakannya kepada rakyat karena surat kabar bersifat massif, kontinyu dan intensif.⁹⁵ Oleh karenanya pula, berbagai tokoh golongan pergerakan memberikan perhatian yang besar kepada media massa.⁹⁶

terhadap kelompok lain dan tidak lagi membawa isu revitalisasi khilafah serta mulai membawa wacana nasionalisme (Islam). Lebih jauh lihat, Chiara Formichi, *Islam and The Making of The Nation: Kartosoewiryo and Political Islam in 20th Century Indonesia*, (Leiden: KITLV Press, 2012), h. 51-52.

⁹⁴ Pers merupakan media cetak yang mengandung penyiaran fakta, pikiran, ataupun gagasan dengan kata-kata tertulis. Definisi pers dewasa ini pun telah berkembang luas, yakni alat untuk menyebarkan informasi yang telah dicari oleh jurnalis dan termasuk berbagai kebijakan yang berkaitan dengan eksistensinya. Istilah pers juga dapat disebut dengan media massa, baik cetak maupun elektronik, serta berbagai bentuk pers, seperti surat kabar/koran, televisi, maupun kantor berita. Peneliti menggunakan istilah pers berdampingan dengan media massa. Namun begitu, istilah pers dalam tesis ini hanya bermakna media cetak (surat kabar). Alex Sobur, *Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), h. 146.

⁹⁵ Meskipun para tokoh pergerakan dapat mengadakan perkumpulan atau rapat besar sebagai cara berkomunikasi, namun hal itu masih terbatas. Sebaliknya, forum yang tersedia oleh media massa atau pers adalah kontinyu dan intensif, sehingga aspirasi mereka dapat terkomunikasikan lebih efektif. Pers telah membuat revolusi komunikasi, antara lain mengubah pola komunikasi tradisional yang terutama lisan sifatnya menjadi tertulis. Pers juga menciptakan sistem komunikasi terbuka, dimana informasi dapat diperoleh oleh golongan sosial manapun. Meskipun komunikasi lewat pers bersifat satu arah, pers mempunyai potensi membangkitkan kesadaran kolektif, antara lain mengenai kepentingan umum, seperti keamanan, kesejahteraan, kemasyarakatan, ketatanegaraan dan lain sebagainya. Saat itu pers sangat membantu tumbuhnya massa kritis dalam masyarakat, kesadaran kolektif, dan solidaritas umum. Dengan kata lain pers mempunyai peranan penting untuk menjalankan pendidikan politik bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu dunia pers mendapat perhatian yang besar dari golongan pergerakan Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru...*, h. 116.

⁹⁶ Kemunculan dan perkembangan pers pribumi juga tidak bisa dilepaskan dari tokoh yang membidani kelahirannya. Hampir seluruh penerbitan pers pribumi dilakukan oleh tokoh-tokoh pergerakan, baik yang bergerak di bidang sosial, politik, pendidikan, keagamaan dan bidang lain-lainnya yang didasarkan pada semangat kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pemikiran dan afiliasi pimpinan pers pribumi pada organisasi tertentu dan tujuan yang ingin dicapai akan memberi warna tersendiri bagi pers yang diterbitkan

Bersamaan dengan besarnya perhatian mereka yang besar ini maka tidak heran sehingga banyak bermunculan surat kabar pada masa itu. Dengan menerbitkan surat kabar secara mandiri, maka mereka akan lebih leluasa, teratur, dan terarah saat menyampaikan aspirasi.⁹⁷

Tidak hanya sebagai penyalur ide maupun gagasan, penerbitan media massa dilakukan pula sebagai suatu upaya dalam merespon suatu wacana, baik dalam rangka mendukung maupun menentang wacana tersebut hingga menimbulkan polemik. Terkait dengan wacana Pan-Islam secara luas -yang berkaitan erat dengan khilafah-, telah banyak terdapat media massa Islam di Hindia Belanda yang menjadi corong bagi perkembangannya.⁹⁸ Dengan demikian, dalam konteks keruntuhan Turki Utsmani, surat kabar *Bandera Islam* dapat disebut sebagai surat kabar yang muncul dalam rangka merespon keruntuhan Turki Utsmani.

Diterbitkan oleh *Comite Bandera Islam Djogjakarta* yang terdiri dari anggota Sarekat Islam Yogyakarta. Surat kabar ini dikelola oleh para pemimpin Sarekat Islam seperti (terutama) Tjokroaminoto, Agus Salim, dan Sjahbuddin Latif. Pertama kali terbit dengan edisi percontohan pada 5 September 1924

dan diasuhnya. Jika, media persnya diterbitkan dan dikelola oleh tokoh-tokoh atau kaum pergerakan yang berideologikan Islam, maka dapat dipastikan ideologi yang sama diusung oleh pers tersebut. Begitu juga, pers yang diterbitkan oleh tokoh-tokoh atau kaum pergerakan yang berideologikan nasionalis (kebangsaan) dan komunis.

⁹⁷ Tidak hanya para tokoh pergerakan saja, masyarakat Hindia Belanda yang tidak tergabung dalam suatu organisasi dapat pula menerbitkan surat kabar dan menjadikan surat kabar terbitannya sebagai organisasi mereka. M. Gani, *Surat Kabar Indonesia pada Tiga Zaman*, (Jakarta: Departemen Penerangan, tt), h. 39-40.

⁹⁸ Diantaranya beberapa media massa Islam di Hindia Belanda yang dikenal vokal dalam menyuarakan Pan-Islam yaitu, *al-Munir*, *Oetoesan Hindia*, *al-Islam*, *Neratja*, *Bintang Islam*, *Pembela Islam*, *Doenia Islam* hingga *Balatentara Islam*. Beragam surat kabar ini (lebih) banyak dikelola oleh golongan pembaharu, terutama surat kabar populer yang melibatkan Tjokroaminoto atau Agus Salim. Lihat, Beggy Rizkiyansyah, "Lahirnya Pers Islam di Indonesia", dalam *Makalah Diskusi Bulanan Jejak Islam bangsa (JIB)*, Bogor, 24 Maret 2014. h. 4-5. Namun semua surat kabar ini pertama kali terbit sebelum tahun 1924 sehingga dapat dikatakan terbit bukan sebagai respon langsung atas keruntuhan Turki Utsmani.

sedangkan edisi pertama terbit pada 2 Oktober 1924. Setiap kali terbit berjumlah empat halaman. Mulanya terbit setiap hari Kamis dan pada perkembangan berikutnya terbit setiap Senin dan Kamis. Selain itu *Bandera Islam* juga memiliki sirkulasi yang luas.⁹⁹

Dengan jargon “organ ini tersedia bagi pergerakan pan-Islamisme”, maka menegaskan posisi *Bandera Islam* sebagai surat kabar yang mengusung Pan-Islam sebagai ideologinya walau kemudian *Bandera Islam* tidak muncul dalam waktu yang bertepatan dengan keruntuhan Turki Utsmani. Hal ini terlihat seperti dalam kutipan berikut:

...Sepanjang pengetahoean kita, maka di dalam negeri toempah-darah toe pergerakan jang bermaksoed, berichtiar dan beroesaha akan mentjapai tjita-tjita „Pan-Islamisme dan akan mendjadikan faham „Pan-Islamisme njata jadi satoe sifat dan perboeatan...¹⁰⁰

Dalam terbitannya, *Bandera Islam* banyak memuat gagasan perjuangan (revitalisasi) khilafah dan reportase terhadap berbagai upaya yang dilakukan dalam perjuangan khilafah. Hal ini dapat pula dilihat sebagai wujud atas respon penghapusan/keruntuhan khilafah di Turki. Posisi Tjokroaminoto dan Agus Salim -sebagai seorang *Pan-Islamist* dan petinggi Sarekat Islam- menjadi penting dalam surat kabar ini untuk memastikan bahwa wacana Pan-Islam sebagai wacana kebangkitan Islam masih akan terus dipropagandakan di tengah masyarakat Hindia Belanda. Di samping itu, posisi Tjokroaminoto dan Agus Salim sebagai

⁹⁹ Tidak didapat keterangan berapa jumlah (oplah) *Bandera Islam* setiap kali terbit. Akan tetapi sejak edisi 12 Februari 1925 dapat diketahui bahwa surat kabar ini mempunyai oplah yang cukup besar dan sirkulasinya tidak hanya di Hindia Belanda tetapi juga menjangkau hingga mancanegara. Luasnya jangkauan ini tidak mengherankan sebab pengaruh Sarekat Islam telah sampai hingga mancanegara. Mohammad Iskandar, *Para Pengemban Amanah: Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat 1900-1950*, h. 137-138.

¹⁰⁰ *Bandera Islam*, 14 Desember 1924.

tokoh umat dapat menjadi jaminan ekonomis akan keberlangsungan surat kabar *Bandera Islam* itu sendiri.

Pembahasan mengenai respon berupa upaya revitalisasi khilafah pertama kali muncul pada edisi Nomor 3 yang terbit tanggal 16 Oktober 1924. Dalam edisi ini *Bandera Islam* memuat sebuah kolom yang berjudul *Loear Hindia: Oetoesan Oemmat Islam Hindia Timoer ke Cairo*. Kolom yang panjangnya hampir satu halaman ini memuat salinan undangan kongres khilafah di Kairo dari ulama al-Azhar dengan bahasa Melayu, dan berita tentang tanggapan umat Islam di Hindia Belanda atas undangan tersebut.¹⁰¹ Terkait upaya revitalisasi khilafah, *Bandera Islam* bahkan menyediakan rubrik khusus yang membahas soal khilafah.¹⁰² Bahkan, surat kabar ini mengutip ayat al-Qur'an sebagai legitimasi atas upaya revitalisasi khilafah.¹⁰³

Dalam perkembangannya kemudian, *Bandera Islam* dapat pula dikatakan sebagai media massa bagi umat Islam Hindia Belanda untuk memperoleh informasi seputar dinamika umat Islam dalam upaya revitalisasi khilafah pasca keruntuhan Turki Utsmani, paling tidak dalam kurun waktu tahun 1924-1926. Surat kabar *Bandera Islam* menjadi sebagai surat kabar Islam pribumi yang sangat *concern* dengan upaya pemberitaan mengenai segala hal yang terkait dengan Pan-Islam.

Surat kabar lain yang juga dapat dikatakan *concern* dengan agenda Pan-Islam pasca runtuhnya Turki adalah *Fadjar Asia*. Ke-*concern*-an ini masih pula ada kaitannya dengan peran dwitunggal Tjokroaminoto dan Agus Salim. Mereka berdualah yang kemudian menerbitkan *Bandera Islam* begitupun dengan *Fadjar*

¹⁰¹ *Bandera Islam*, 16 Oktober 1924.

¹⁰² *Bandera Islam*, 25 Desember 1924.

¹⁰³ *Bandera Islam*, 23 Juli 1925.

Asia sebagai media yang lahir pasca keruntuhan Turki dan tetap membawa Pan-Islam hingga akhirnya wacana ini ditinggalkan.

Dengan jargonnya “surat kabar penerangan Islam tentang agama, adab, dan politik”, *Fadjar Asia* terbit sebagai pelanjut dari *Bandera Islam* yang berhenti terbit dikarenakan dilanda krisis keuangan lantaran banyak pelanggan dan agen-agen yang belum atau mungkin juga tidak membayar “kewajibannya”. Penerbitan *Fadjar Asia* kembali dipelopori oleh Agus Salim dan juga Tjokroaminoto setelah mendapatkan modal tambahan dari Ibnu Sa’ud pasca kongres kedua di Mekah.¹⁰⁴

Dalam konteks politik, surat kabar ini menegaskan kembali responnya atas kehidupan politik umat Islam di Hindia Belanda, bahwasanya agama tidak dapat dipisahkan dalam usaha berpolitik.¹⁰⁵ Berkaitan dengan wacana Pan-Islam, *Fadjar Asia* masih menjadi corong utamanya di tahun 1927 hingga 1929.¹⁰⁶ Hal ini terlihat dari kutipan berikut:

.....Terhadap kepada Islam, FADJAR ASIA memakai asas Pan-Islam, jang mengandoeng pengakoean kewadajiban merapatkan perhoeboengan antara bangsa-bangsa Islam dalam seloeroeh doenia soepaja dapat memperhoeboengkan besar dan tenaga dalam segala keperluan hidoep oemmat dan kemadjoean agama dan soepaja dapat mempersatoekan haloean dan toejoean oemmat Islam sedoenia.....¹⁰⁷

¹⁰⁴ Kemungkinan menerbitkan *Fadjar Asia* ini terbuka ketika Agus Salim pulang dari Mekkah pada tahun 1927 sepulang menghadiri kongres al-Islam kedua di Mekah. Kala itu raja Saudi Arabia terkesan mendengar cita-cita Agus Salim untuk menyadarkan rakyat Indonesia agar nantinya mampu membebaskan dirinya dan tanah air dari cengkraman penjajah. Raja tersebut lalu berkenan menyumbangkan sejumlah uang, yang kemudian dimanfaatkan oleh Agus Salim untuk menerbitkan surat kabar. Usaha ini dikerjakan bersama Tjokroaminoto dan seorang rekan yang memiliki modal kuat. Panitia Peringatan Seratus Tahun Haji Agus Salim, *Seratus Tahun Haji Agus Salim*, h. 73-74.

¹⁰⁵ *Fadjar Asia*, 3 Januari 1928.

¹⁰⁶ Sulit untuk melacak media massa (dalam hal ini surat kabar) yang terbit dalam rentang 1924 hingga 1929 di Hindia Belanda, terutama sekali media yang diterbitkan oleh pribumi Islam dan jika dikhususkan, menjadi media massa Islam yang mewacanakan Pan-Islam. Hal ini bisa dilihat dari jumlah media massa di tahun 1928 dimana jumlah terbitan surat kabar yang diterbitkan masyarakat Tionghoa berjumlah dua belas dan surat kabar yang diterbitkan masyarakat Belanda berjumlah tiga belas. Jumlah terbitan surat kabar pribumi sendiri hanya berjumlah delapan. Terutama di Bandung dan Surabaya yang merupakan basis pergerakan, tidak tercatat terdapat terbitan surat kabar pribumi di kedua kota ini. Batavia sebagai pusat Hindia Belanda juga hanya terdapat dua surat kabar terbitan pribumi. Lihat, Abdurrachman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, h. 94-95.

¹⁰⁷ *Fadjar Asia*, 17 Juli 1928.

Fadjar Asia menjadi surat kabar utama yang menjadi corong propaganda Pan-Islam di Hindia Belanda. Bahkan dalam perkembangannya, *Fadjar Asia* menjadi lebih radikal dalam propagandanya. Hal ini tidak terlepas dari masuknya nama Kartosoewirjo sebagai salah seorang dewan redaksinya. Bahkan pada tahun 1928-1929 posisi Kartosoewirjo di *Fadjar Asia* semakin kuat setelah Tjokroaminoto sering mengalami sakit dan Agus Salim yang juga memiliki kesibukan lain. *Fadjar Asia* di tangan Kartosoewirjo semakin menegaskan diri sebagai organisasi¹⁰⁸ dan surat kabar utama yang menjadi corong propaganda Pan-Islam di Hindia Belanda.

Pasca berhenti terbitnya *Fadjar Asia*,¹⁰⁹ kehidupan pers Islam masih tetap semarak. Media massa, baik surat kabar maupun majalah yang membawa

¹⁰⁸ *Fadjar Asia* ketika terbit telah memutuskan untuk tidak membawa nama Sarekat Islam di dalamnya, sehingga dalam tiap terbitannya *Fadjar Asia* mengklaim sebagai surat kabar yang tidak berafiliasi (langsung) dengan Sarekat Islam. Sebagai gantinya, *Fadjar Asia* menjadi organisasi tersendiri di luar pengaruh Sarekat Islam. Hal ini dilakukan dalam rangka menarik dukungan baru dari umat Islam Hindia Belanda. Pun begitu, dalam tiap terbitannya, pengaruh dan “rasa” Sarekat Islam masih terasa dengan kuat.

¹⁰⁹ Permasalahan yang menimpa penerbitan pribumi juga turut menimpa *Fadjar Asia*. *Fadjar Asia* hanya mampu bertahan selama tiga tahun. Ketiadaan dana operasional menjadikan *Fadjar Asia* mundur dari peredaran sedikit demi sedikit. Namun yang menarik, baik *Bandera Islam* maupun *Fadjar Asia* yang terang-terang mempropagandakan Pan-Islam (secara radikal-fundamental) yang berkaitan dengan upaya perlawanan terhadap pemerintah kolonial, tidak mendapat tindakan tegas dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setidaknya ada tiga alasan yang dapat dikemukakan mengenai terhindarnya surat kabar ini (terutama *Fadjar Asia*) dari tindakan pemerintah kolonial. Pertama, *Fadjar Asia* terbit pada masa Gubernur Jenderal de Graeff, seorang pejabat pemerintah yang dikenal sangat liberal. Meskipun ia mempunyai hak luar biasa (*Exorbitante Recht*), namun ia tidak menggunakan hak luar biasanya itu untuk menindak *Fadjar Asia*. Lain halnya dengan sikap Gubernur Jenderal setelahnya, yaitu de Jonge yang memang sejak mula sudah bertekad untuk tidak mentolerir semua omong kosong agitator politik bumiputera yang dianggapnya sok pintar. *Exorbitante Recht* yang digunakan de Graeff hanya untuk kondisi-kondisi yang genting dan mendesak, ternyata oleh de Jonge digunakan dengan sangat mudahnya termasuk untuk pers yang tidak disenanginya. Hasilnya banyak terjadi pembreidelan terhadap pers pergerakan. Jadi, adalah suatu kebetulan bahwa *Fadjar Asia* terbit pada saat Hindia Belanda dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal yang sangat liberal dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk semena-mena menggunakan hak luar biasanya, sehingga *Fadjar Asia* terhindar dari tindakan pemerintah yang dapat menghambat peredarannya. Kedua, sebagaimana telah disebutkan bahwa peraturan pemerintah mengenai pembreidelan pers (*Persbreidel Ordonantie*) baru muncul setelah *Fadjar Asia* tidak terbit lagi. Jika peraturan tersebut telah muncul pada masa terbitnya *Fadjar Asia*, bukan mustahil surat kabar tersebut juga menjadi korban peraturan tersebut seperti media pergerakan lainnya. Kemungkinan dapat dibreidelnya *Fadjar Asia* didasarkan pada pengamatan bahwa surat kabar ini banyak mengkritisi dan menegcam kebijakan-kebijakan pemerintah baik dengan bahasa yang halus maupun kasar. Ketiga, baik *Bandera Islam* dan *Fadjar Asia* yang dikelola oleh dwitunggal Tjokroaminoto dan Agus Salim sangat memusuhi paham Komunis, dimana Komunisme pada masa itu juga menjadi musuh pemerintah kolonial. Permusuhan mereka yang juga keras terhadap Komunis ini secara tidak langsung malah membantu pemerintah kolonial dalam menekan golongan (Islam) Komunis.

semangat Islam, baik yang diinisiasi oleh individu tertentu maupun organisasi Islam masih terus bermunculan. Meskipun demikian, media massa yang menjadikan Pan-Islam yang berkaitan dengan wacana khilafah dan keruntuhan Turki Utsmani sudah tidak ada lagi pasca berhenti terbitnya *Fadjar Asia*. Pada akhirnya isu khilafah juga mulai ditinggalkan oleh media massa Islam di Hindia Belanda.

Begitulah, penerbitan media massa merupakan salah satu bentuk respon (tertulis) yang mampu menggambarkan beragam sikap atas suatu masalah. Umat Islam Hindia Belanda -yang terwakili dalam organisasi/elit Islam- jelas merespon keruntuhan Turki dengan upaya penerbitan media massa -dengan beragam nama dan afiliasi secara organisasi-. Dalam dunia media massa pula kita dapat melihat bagaimana dinamika sikap (sebagai bagian dari respon) umat Islam terhadap keruntuhan Turki Utsmani. Dinamika ini menggambarkan beragam pola respon yang akan sangat terkait erat dengan teknik analisis berita yang berbeda antar satu media dengan media lainnya.¹¹⁰

¹¹⁰ Dalam pembahasan sub bab ini tidak diketengahkan mengenai dinamika terkait dengan sikap yang ditunjukkan oleh beragam media. juga tidak terkait dengan bagaimana media mengkomunikasikan ide-ide yang diyakininya serta tidak pula terkait dengan bagaimana media tersebut mencitrakan dirinya. Dalam konteks ini, perlu diketengahkan pula bahwa media massa melakukan proses pembentukan dan konstruksi realita dan diujungnya terdapat bagian-bagian tertentu yang ditonjolkan dan ada bagian-bagian yang lain disamarkan atau bahkan dihilangkan. Aspek yang tidak ditonjolkan kemudian akan terlupakan oleh khalayak karena khalayak digiring pada satu realitas yang ditonjolkan oleh media tersebut. Hal ini dikenal dengan istilah *framing*. *Framing* adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Di tambah pula dengan berbagai kepentingan, maka konstruksi realitas politik sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan dengan berita tersebut. Disini media memberikan ruang kepada salah satu realita untuk terus ditonjolkan. Dan ini merupakan sesuatu realita yang direncanakan oleh suatu media untuk ditampilkan. Dalam menampilkan suatu realita ada pertimbangan terkait dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Secara selektif media menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkannya. Ketika melakukan penyuntingan misalnya. Dalam hal ini wartawan sendiri memilih mana berita yang disajikan dan mana yang disembunyikan. Dengan demikian media mempunyai kemampuan untuk menstruktur dunia dengan memilah berita tertentu dan mengabaikan yang lain. Media membentuk citra seperti apa yang disajikan oleh media dengan cara menyediakan ruang atau waktu untuk sebuah realitas dengan ruang dan waktu secara tertentu. Lihat, Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Simiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 162-167.

F. Isu Khilafah di Hindia Belanda Ditinggalkan

Setelah dalam periode 1924-1928 isu khilafah menjadi isu besar bagi umat Islam di Hindia Belanda, maka pada 1929 isu ini telah mulai ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal. Secara luas, politik Islam di Hindia Belanda pada pertengahan tahun 1920-an telah mengalami fase kemunduran curam dengan naiknya wacana Komunisme dan Nasionalisme di tengah-tengah masyarakat Hindia Belanda. Namun, bukan berarti politik Islam yang dijalankan organisasi pergerakan Islam terutama Sarekat Islam hilang, namun hanya mengubah orientasi perjuangannya.¹¹¹

Secara spesifik isu khilafah mulai ditinggalkan disebabkan beberapa hal. Pertama, hal ini sangat terkait erat dengan posisi Sarekat Islam -dengan Tjokroaminoto dan Agus Salim sebagai pimpinannya- yang menjadi *role leader* wacana Pan-Islam. Pasca kepulangan Tjokroaminoto usai menghadiri kongres di Mekah pada tahun 1926, muncul isu mengenai pribadi Tjokroaminoto yang mengecewakan golongan pembaharu lain, (terutama dari Muhammadiyah) selama Tjokroaminoto berada di Mekah. Pada saat Tjokroaminoto di Mekah, terdapat pula beberapa tokoh Muhammadiyah di Mekah yang sedang menunaikan ibadah haji. Ketika itu mereka kecewa melihat perilaku Tjokroaminoto, suatu hal yang tidak mereka duga terdapat pada pemimpin besar ini. Menurutnya, pemimpin Sarekat Islam tersebut banyak meninggalkan sembahyang selama berada di Mekah, sering absen dari sidang-sidang kongres dan juga mengalami kesulitan dalam mengikuti sidang yang diselenggarakan dalam bahasa Arab karena tidak

¹¹¹ Terutama sekali orientasi yang awalnya bersifat perjuangan Islam secara global menjadi perjuangan Islam secara lokal (nasionalisme Islam). Lihat, Chiara Formichi, *Islam and The Making of The Nation...*, h. 24.

menguasai bahasa tersebut. Dari pandangan ini kemudian muncul dugaan bahwa Tjokroaminoto telah menyelewengkan dana delegasi. Walaupun dalam Kongres al-Islam keenam tuduhan-tuduhan ini ditangkis namun tetap saja terjadi kerenggangan antar golongan pembaharu, terutama antara Sarekat Islam dan Muhammadiyah.¹¹²

Buntut dalam masalah tersebut adalah pemberlakuan disiplin partai oleh Sarekat Islam kepada Muhammadiyah. Pada Januari 1927, kongres Sarekat Islam di Pekalongan memutuskan untuk membolehkan cabang-cabang partai melakukan disiplin terhadap anggota Muhammadiyah bila tindakan tersebut disetujui pusat. Kongres juga memerintahkan pengurus eksekutif partai agar melarang para anggotanya menghadiri kongres Muhammadiyah yang akan dilaksanakan pada tahun itu juga. Puncak keretakan terjadi pada tahun 1929. Sarekat Islam mengambil tindakan disiplin umum terhadap Muhammadiyah.¹¹³ Dengan demikian setiap anggota Sarekat Islam tidak boleh merangkap menjadi anggota Muhammadiyah. Mereka harus memilih salah satu antara Sarekat Islam dan Muhammadiyah.

Pemberlakuan disiplin partai ini jelas memengaruhi citra Sarekat Islam yang awalnya dianggap sebagai pemersatu umat Islam. Dampaknya kemudian citra kepemimpinan dalam Sarekat Islam mulai luntur karena dianggap pula sebagai pihak yang memicu konflik internal diantara umat Islam sendiri.¹¹⁴

¹¹² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 255-256.

¹¹³ *Ibid*, 257.

¹¹⁴ Di periode ini, Sarekat Islam ada di fase untuk memertahankan eksistensinya di panggung politik, setelah di fase sebelumnya mengalami masa konsolidasi akibat beberapa tekanan politik. Hal ini terjadi karena para elit Sarekat Islam juga tidak dapat lagi mengatasi konflik yang tumbuh di dalam tubuh Sarekat Islam sendiri, terutama setelah masuknya ideologi Marxisme-Komunis ke dalam tubuh Sarekat Islam. Lihat, *Ibid*, 114-115. Merosotnya peran Sarekat Islam ini juga disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang

Sarekat Islam kemudian juga berusaha memonopoli persoalan khilafah. Sarekat Islam menganggap diri sebagai satu-satunya wakil pihak umat Islam Hindia Belanda dengan mengubah MAIHS menjadi bagian dari partainya. Perubahan itu dilakukan meskipun tidak disetujui oleh Muhammadiyah.¹¹⁵ Namun sebelumnya, monopoli persoalan khilafah ini telah dilakukan oleh golongan pembaharu terhadap golongan tradisional. Hal ini ditunjukkan dari tidak diakomodirnya aspirasi golongan tradisional pada kongres al-Islam keempat dan kelima. Oleh karena merasa kecewa, golongan tradisional memilih keluar dari kongres al-Islam dan keanggotaan Komite Khilafah.

Monopoli isu khilafah ini jelas membuat isu khilafah menjadi isu yang eksklusif. Dampaknya kemudian muncul rasa enggan bagi pihak lain untuk turut serta kembali dalam isu ini dengan anggapan bahwa mereka tidak akan memiliki posisi yang sama seperti sebelumnya. Maka, dua hal yang dilakukan Sarekat Islam ini justru menjadikan posisi Sarekat Islam sebagai *role leader* tidak lagi populer dan isu khilafah yang tadinya menjadi isu bersama, lambat laun mulai ditinggalkan.

Kedua, adanya perubahan orientasi perjuangan sejumlah pergerakan pada masa itu. NU sebagai wakil golongan tradisional, serta Muhammadiyah, dan al-Irsyad sebagai wakil golongan pembaharu, akhirnya lebih memfokuskan

paling penting adalah ketidakmampuan para pemimpin dan aktivisnya untuk mengatasi berbagai perbedaan pandangan di antara mereka. Lihat, Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (terj: Ihsan Ali-Fauzi dan Rudy Harisyah Alam), (Jakarta: Paramadina, 2009), h. 72.

¹¹⁵ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, h. 153.

perjuangan mereka ke bidang keagamaan, sosial dan pendidikan.¹¹⁶ Perubahan orientasi ini secara alamiah mengakibatkan isu khilafah -yang lebih terasa sebagai isu politik- juga turut ditinggalkan.

Ketiga, tidak didukungnya wacana revitalisasi khilafah ini di belahan dunia Islam lainnya. Hal ini telah terlihat dalam beberapa kali penyelenggaraan kongres al-Islam dunia, dimana para peserta kongres tidak menyepakati kesatuan mengenai konsep khilafah. Hal ini telah tergambar dalam pelaksanaan kongres al-Islam dunia, terutama yang diadakan di Kairo maupun di Mekah. Umat Islam kemudian juga mulai menafsirkan gagasan Pan-Islam yang awalnya erat kaitannya dengan pendirian kembali kekhilafahan, menjadi upaya peningkatan solidaritas antar umat Islam semata.¹¹⁷ Bahkan oleh Sarekat Islam sendiri, Pan-Islam mulai diterjemahkan dalam tingkat yang lebih lokal dalam format Nasionalisme Islam.¹¹⁸

Keempat, munculnya PNI. PNI yang dikepalai oleh Soekarno dengan cepat mendapatkan simpati dari rakyat Hindia Belanda. Hal ini dapat terjadi karena di awal berdirinya PNI telah menyatakan diri sebagai organisasi yang akan berjuang memperoleh kemerdekaan dengan cara non kooperatif (radikal).¹¹⁹ PNI

¹¹⁶ Martin van Bruinessen, *Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question*, h. 128. Hal ini dapat dilacak dari AD/ART masing-masing organisasi ini yang sedari awal pendiriannya memang tidak untuk masuk dalam dunia politik (praktis).

¹¹⁷ Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 90-91. Pasca keruntuhan Turki, beberapa kawasan dunia Islam memunculkan ideologi perjuangannya sendiri-sendiri seperti kawasan Hijaz, Hadramaut, dan Syam yang memunculkan ideologi Pan-Arab dengan konsep *nation-state*. Hal ini dianggap erat pula kaitannya dengan upaya pihak Barat dalam menanamkan pengaruhnya di tengah-tengah umat Islam dunia. Dapat lihat, June Cahyaningtyas, *Saddam: The Untold Story*, (Bandung: Hikmah, 2007), h. 37-50.

¹¹⁸ Terkait dinamika bagaimana SI mulai menerjemahkan ulang wacana Pan-Islam setelah tahun 1930 dapat lihat, Chiara Formichi, *Islam and The Making of The Nation...*, h. 125-146.

¹¹⁹ Hal ini tidak terlepas dari situasi sosial politik Hindia Belanda. Pasca paham komunis -lewat organisasi PKI- melakukan pemberontakkannya tahun 1926/1927, para tokoh pergerakan merasa perlu untuk membentuk wadah baru dalam rangka untuk menyalurkan hasrat dan aspirasi rakyat yang tidak mungkin ditampung oleh organisasi-organisasi politik yang telah ada pada waktu itu. Hal ini ditambah dengan kemerosotan peran yang dimiliki oleh Sarekat Islam. Selain itu juga timbul suatu kekosongan dalam gerakan

juga mampu untuk mengkoordinir beragam organisasi pergerakan untuk turut berjuang dalam satu wadah perjuangan yang sama, -sesuatu yang dulu pernah dilakukan Sarekat Islam-. PNI juga mampu mengambil massa SI baik dari para elit politik dan juga massa di tingkat akar rumput. Ketidakmampuan SI untuk mendapatkan momentumnya dimanfaatkan PNI dengan sangat baik. SI sebagai organisasi pergerakan sudah tidak mampu lagi bersaing dengan PNI secara langsung akibat beragam faktor internal.¹²⁰ Di sisi lain, kharisma Soekarno turut pula mendongkrak citra PNI. Kemampuan Soekarno dalam berorasi menjadikannya sebagai sosok pejuang baru atau singa podium yang menggantikan posisi Tjokroaminoto di tengah masyarakat. Yang terpenting, PNI pada akhirnya membawa ideologi nasionalisme (netral agama) yang selalu dipopulerkan dalam setiap kegiatannya.¹²¹ Hal inilah yang kemudian menjadikan wacana Pan-Islam menjadi semakin ditinggalkan di tengah umat Islam Hindia Belanda.

Begitulah, dari beragam data yang ada, dapat dijelaskan bahwa bentuk-bentuk respon umat Islam Hindia Belanda atas keruntuhan Turki Utsmani pada tahun 1924 mengalami dinamika. Sejak awal, umat Islam Hindia Belanda telah memiliki ikatan emosional dalam melihat kekhalifahan yang berada di Turki, baik sebagai sebuah institusi rohani maupun duniawi. Maka, ketika kabar bahwa kekhalifahan di Turki Utsmani secara resmi telah di hapuskan pada Maret 1924,

nasionalis, di mana gerakan nasionalis ini memerlukan pengarah dan pimpinan, baik dari sisa-sisa organisasi politik yang ada maupun pembentukan partai-partai baru.

¹²⁰ Dapat lihat, John Ingelson, *Jalan ke Pengasingan* (terj: Zamakhsyari Dhofier), (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 48-50.

¹²¹ Secara politis, gagasan nasionalisme menjadi diterima oleh umat Islam Hindia Belanda karena adanya pertentangan ideologis antara organisasi pergerakan yang baru tumbuh, terutama di sekitaran tahun 1927. Diskursus ideologi ini pada akhirnya mendorong pula para tokoh Islam mengemas Pan-Islam dengan pandangan yang lebih lokal, yang dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai nasionalis agama (Islam). Lihat, Abdul Aziz, *Chieftdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*, h. 112-113.

umat Islam Hindia Belanda langsung meresponnya, dimana ada tiga bentuk respon umat Islam Hindia Belanda -yang terwakili dalam beragam organisasi Islam- dalam menyikapi keruntuhan Turki Utsmani selama rentang waktu 1922-1932.